

**“DERADIKALISASI” DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DI INDONESIA**

Asia Report N°142 – 19 November 2007

DAFTAR ISI

RINGKASAN IKHTISAR DAN REKOMENDASI.....	i
I. PENDAHULUAN.....	1
II. LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA	2
A. KERANGKA HUKUM.....	3
B. ORGANISASI DALAM PENJARA	4
C. GENG DAN KEKERASAN.....	6
D. STAF PENJARA.....	8
III. ISOLASI ATAU INTEGRASI?	9
A. LAPAS KEROBOKAN, BALI	10
B. AMAN (OMAN) ABDURRAHMAN.....	11
IV. STRATEGI-STRATEGI “DERADIKALISASI”	14
A. FOKUS PADA NARAPIDANA	14
B. ARGUMENTASI ALI IMRON	15
C. MERUBAH SIKAP TERHADAP PARA PETUGAS.....	16
D. MENGGUNAKAN JARINGAN AFGHAN	18
E. MEREKA YANG TIDAK HADIR	19
V. KESIMPULAN	20
LAMPIRAN	
A. PETA LAPAS YANG TERSEBUT DALAM LAPORAN.....	21
B. NARAPIDANA INDONESIA YANG TERKAIT JI SAMPAI DENGAN NOVEMBER 2007.....	22
C. NARAPIDANA JI YANG BARU SAJA DIBEBASKAN	28

“DERADIKALISASI” DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

RINGKASAN IKHTISAR DAN REKOMENDASI

Indonesia, seperti halnya negara-negara lain dimana sel-sel jihadis telah berhasil dibongkar, selama tiga tahun terakhir ini sedang melakukan eksperimen dengan program “deradikalisasi”. Meskipun istilah ini memiliki arti yang berbeda bagi orang-orang yang berbeda, pada dasarnya program ini meliputi proses meyakinkan para ekstremis untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Program ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi “*root causes*” (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan ini, tetapi pada umumnya, semakin luas definisinya, semakin kurang tajamnya fokus program-program yang disusun. Pengalaman menunjukkan bahwa upaya-upaya deradikalisasi di Indonesia, betapapun kreatifnya, tidak dapat dinilai secara terpisah dan kemungkinan akan gagal kalau tidak dimasukkan kedalam sebuah program reformasi penjara yang lebih luas.

Sebuah inisiatif di Indonesia, yang terarah kepada para napi yang terlibat dalam kasus terorisme, telah mendapat pujian atas keberhasilannya meyakinkan puluhan anggota JI dan beberapa anggota organisasi jihad yang lain untuk bekerja sama dengan polisi. Elemen kuncinya adalah mengenal napi-napi secara individu dan menanggapi kekhawatiran mereka, yang seringkali berkaitan dengan kebutuhan ekonomi keluarga. Jika melalui kebaikan, polisi dapat mengubah asumsi jihadi bahwa pejabat pemerintah menurut definisi adalah *thoghut* (anti Islam), maka asumsi-asumsi lain mungkin akan dipertanyakan, termasuk tentang kapan dan dimana jihad diperbolehkan..

Ketika para napi menunjukkan kesediaan untuk menerima bantuan dari polisi, maka mereka membuka dirinya terhadap argumentasi agama oleh ustadz-ustadz yang kredibilitas di dalam gerakan jihad tidak bisa diragukan. Beberapa dari mereka kemudian telah menerima bahwa penyerangan-penyerangan terhadap warga sipil, seperti bom Bali I dan II dan bom Kedubes Australia, adalah salah. Tetapi, bantuan ekonomi pada akhirnya lebih penting dari argumentasi agama dalam mengubah sikap para napi ini.

Hingga saat ini program di Indonesia tersebut sebagian besar telah dilihat secara terpisah dari perkembangannya yang lain dan tanpa banyak mempertanyakan mengenai sebab dan akibatnya. Contohnya, hanya sedikit upaya yang dilakukan untuk menilai apakah lebih banyak yang meninggalkan dari pada yang masuk organisasi jihad; atau apakah orang-orang yang ikut program tersebut memang sudah cenderung sebelumnya untuk menolak pengeboman; atau apakah inisiatif tersebut telah menimbulkan reaksi balik di dalam kelompok-kelompok jihadis. Selama ini hampir tidak pernah ada diskusi publik mengenai dimana keseimbangan yang tepat antara kebaikan terhadap para pelaku, dalam upaya untuk mencegah aksi penyerangan dimasa datang, dan keadilan bagi para korban.

Sejauh ini juga tidak cukup perhatian yang diberikan terhadap hubungan antara program deradikalisasi dan sistem pemasyarakatan di Indonesia – dan keberhasilan yang satu bisa dilemahkan oleh kinerja buruk dari yang lain. Sekarang ini di Indonesia ada sekitar 170 orang laki-laki (tidak ada perempuan) yang meringkuk dalam penjara atas keterlibatan mereka dalam tindak kriminal terorisme, kurang dari setengahnya adalah anggota JI. Sejak 1999, sekitar 150 orang laki-laki dan satu orang perempuan sudah dibebaskan setelah menjalani hukuman yang berhubungan dengan aksi terorisme; pada tahun 2006-2007 saja, lebih dari 60 orang dibebaskan.

Pada akhirnya, inisiatif polisi ditujukan pada penggunaan bekas napi sebagai ujung tombak pembaharuan di dalam lingkungan mereka sendiri. Tetapi tugas tersebut menjadi jauh lebih berat karena longgarnya sistem penjara dimana para napi jihadis bersatu untuk melawan atau melindungi diri terhadap geng-geng napi yang lain; dimana pemrakarsa ideologi yang *hard core* bisa merekrut penjahat biasa dan sipir penjara; dan dimana korupsi begitu merajalela sehingga hal ini memperkuat anggapan mereka bahwa pejabat pemerintah adalah *thoghut*. Pada kenyataannya, polisi berupaya sekuat mungkin untuk tetap memenjarakan para terdakwa jihadis di tahanan polisi, karena mereka tahu bahwa begitu

orang-orang ini dipindahkan ke penjara, semua pengaruh positive dari program deradikalisasi bisa hilang. Petugas penjara di Indonesia baru saja mulai diikutkan dalam program pelatihan counter-teror. Keterlibatan mereka perlu dilanjutkan tetapi persoalannya jauh lebih dalam. Kalau korupsi di dalam penjara tidak ditangani, maka para jihadis, seperti halnya pelanggar narkoba, pembunuh, dan koruptor kelas kakap, akan bisa berkomunikasi dengan siapapun yang mereka mau dan menyasiasi peraturan apapun yang dimaksudkan untuk membatasi pengaruh mereka terhadap napi yang lain. Kalau petugas penjara tidak banyak tahu mengenai para jihadis yang berada dalam pengawasan mereka, mereka tidak akan tahu apa yang harus diawasi dalam hal perekrutan – misalnya, siapa diantara para napi biasa yang bergabung dengan kelompok jihadis, mengapa dan berapa lama – atau dalam penyebaran ajaran radikal. Kalau tidak ada koordinasi yang lebih baik antara petugas penjara dan polisi, pada akhirnya mungkin mereka dengan tidak sengaja akan saling memperlakukan hasil kerjanya..

Reformasi dalam LP sangat dibutuhkan di Indonesia untuk banyak alasan, tetapi membantu program deradikalisasi adalah salah satunya.

REKOMENDASI-REKOMENDASI KEPADA

Pemerintah Indonesia:

1. Mendorong lebih banyak donor untuk membantu sebuah penilaian kebutuhan yang independen terhadap penjara-penjara di Indonesia dimulai dengan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang paling besar seperti di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, Bali dan Makassar, dan dengan perhatian utama terhadap keperluan pelatihan staf, pengawasan korupsi dan pengolahan informasi. Mereka yang melakukan penilaian-penilaian sebaiknya berupaya untuk mewawancarai sipir penjara diluar penjara, agar mereka bisa leluasa untuk bicara, dan bekas napi.
2. Memprioritaskan upaya mengurangi korupsi di lapas, terutama:
 - a) Mendorong audit yang secara profesional dan independen terhadap lapas-lapas yang disebutkan diatas, serta mempublikasikan dan melakukan diskusi-diskusi publik atas hasilnya;
 - b) Mengembangkan sebuah sistem insentif yang mendorong para *whistle-blowers* untuk melaporkan petugas penjara yang korup dan sebuah sistem sanksi yang ketat bagi mereka,

termasuk yang menarik pungutan ilegal terhadap napi dan keluarganya

- c) Bekerja sama dengan Fakultas Kriminologi Universitas Indonesia dan lembaga-lembaga lain untuk melakukan wawancara rahasia dengan para napi dan bekas napi mengenai praktek-praktek korupsi dengan cara yang dapat memberikan informasi bagi program reformasi.
3. Mengembangkan sebuah pelatihan *on-the-job* atau magang bagi para petugas penjara yang bertujuan untuk memperbaiki praktek-praktek manajemen, pengawasan sipir dan pengetahuan mengenai napi-napi tertentu.
4. Meningkatkan koordinasi antara para pejabat lembaga pemasyarakatan, pengadilan dan polisi, terutama dalam kasus mereka yang ditangkap karena terorisme dan tindak kriminal yang berkaitan, yang berkenaan dengan berbagi informasi tentang para napi dan menyesuaikan program-program LP dan pengawasan untuk memenuhi kebutuhan individu.

Direktorat Pemasyarakatan:

5. Menetapkan tujuan performa kerja (*performance goals*) yang realistis bagi para pengelola lembaga pemasyarakatan dan sebuah struktur insentif yang mendorong untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut dalam hal sebagai berikut:
 - a) Memberantas korupsi, termasuk dalam pengangkatan napi sebagai pemuka dan tampung;
 - b) Memperbaiki pengawasan dan analisa kegiatan para napi, termasuk pertemuan-pertemuan dan diskusi mereka, kelompok geng, dan kegiatan-kegiatan bisnis;
 - c) Memeriksa para pengunjung, termasuk menggeledah tidak hanya narkoba, senjata atau uang, tetapi juga barang-barang cetak dan elektronik yang dilarang;
 - d) Menyusun program-program pelatihan kejuruan yang dikaitkan ke pasar kerja
 - e) Menegakkan peraturan-peraturan termasuk larangan terhadap penggunaan telepon genggam dan peredaran uang di dalam penjara.
6. Membuat buku panduan bagi para pengelola penjara dalam memperlakukan napi-napi kategori tertentu, termasuk mereka yang dihukum karena terorisme dan tindak kriminal terkait, dan menjelaskan apa yang perlu dicari/dilihat untuk memastikan bahwa penjara tidak menjadi basis perekrutan.

Polisi:

7. Menetapkan tujuan dan ukuran keberhasilan bagi program deradikalisasi dan apa yang dibutuhkan untuk mencapainya; juga melakukan sebuah evaluasi internal untuk memahami kekuatan dan kelemahan program tersebut, mengapa beberapa individu menolak ikut program tersebut dan dampak program ini, jika ada, terhadap ancaman keamanan secara keseluruhan.
8. Membuat definisi secara lebih jelas, walaupun hanya untuk urusan internal, bagaimana orang-orang yang sudah di ‘deradikalisasi’ bisa menyebarkan pesan mereka ke sekolah-sekolah JI dan tempat-tempat lain yang diketahui menjadi tempat perekrutan.
9. Mengadakan sebuah penilaian yang terus terang, jika perlu secara tertutup untuk tujuan keamanan, tetapi dengan dihadiri pihak luar yang bisa memberikan komentar independen, mengenai biaya program, hasilnya yang kongkret, keuntungan dan kerugian yang dilihat antara keadilan dan pencegahan konflik, dan apakah mungkin program ini yang sejauh ini tergantung pada pendekatan yang sangat personil, bisa dilembagakan.

10. Memberi perhatian lebih kepada para napi biasa yang bisa direkrut oleh kelompok jihadi didalam penjaradan memastikan bahwa mereka diawasi dengan cara yang sama seperti terhadap anggota organisasi jihadis yang slama.

Jakarta/Brussels, 19 November 2007

“DERADIKALISASI” DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

I. PENDAHULUAN

Pemerintah di seluruh dunia sedang berusaha keras untuk mencari cara menangani para narapidana kasus terorisme. Seperti Inggris yang belajar dari kasus Irlandia Utara, pilihan-pilihan yang diambil bisa membawa pengaruh jangka panjang terhadap gerakan politik para teroris.¹ Tak satupun negara yang telah menemukan formula yang tepat. Penyiksaan di penjara yang dilakukan oleh Amerika Serikat telah menjadi contoh utama untuk hal-hal yang seharusnya tak dilakukan. Perancis, Spanyol, Malaysia, Australia, Singapura serta beberapa negara lainnya telah menawarkan metode mereka untuk ditiru, namun belum jelas apakah metode-metode ini dapat diterapkan di negara lain.

Setidaknya ada dua persoalan utama. Pertama, berhubungan dengan manajemen lembaga pemasyarakatan. Apakah para teroris sebaiknya ditempatkan di sebuah blok isolasi atau justru disatukan dengan napi lainnya dan apa konsekwensi dari pilihan ini? Lantas dimana keseimbangan yang tepat antara hukuman dengan rehabilitasi, antara kontrol yang ketat untuk mencegah lebih banyak perekrutan oleh napi teroris, namun cukup manusiawi untuk mencegah radikalisis yang lebih lanjut?

Kedua, soal deradikalisis pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk meyakinkan teroris dan pendukung mereka untuk meninggalkan kekerasan. Seperti halnya upaya diplomasi publik yang bertujuan memenangkan hati dan pikiran, upaya deradikalisis kelihatannya sering menjadi sebuah hal yang kurang realistis, yang didukung jumlah dana besar namun dengan pengetahuan yang minim mengenai jaringan si teroris. Deradikalisis juga merupakan sebuah istilah yang bisa dipakai untuk merujuk ke segala hal, mulai dari konseling untuk para napi hingga bantuan pembangunan bagi pesantren dan madrasah. Namun titik awalnya seringkali dari penjara, sebab para napi terorisme adalah sebuah kelompok terbatas, yang menjadi pendengar bukan karena sukarela untuk pendekatan yang berbeda, dan ketika bebas, bisa

menjadi ujung tombak untuk mengubah organisasi dan masyarakat mereka dari dalam.

Sementara inisiatif-inisiatif deradikalisis yang inovatif sedang dilakukan, namun bisa saja inisiatif-inisiatif ini bisa dilemahkan oleh kegagalan manajemen lembaga pemasyarakatan (lapas). Indonesia merupakan sebuah studi kasus yang sangat menarik. Ia memiliki organisasi-organisasi ekstremis yang lahir dan berakar di dalam negeri, diantara kelompok-kelompok ini, Jemaah Islamiyah adalah organisasi yang paling terkenal.² Saat ini, di Indonesia sekitar 170 orang dipenjara atas tuduhan terorisme atau tindak kriminal lain terkait kegiatan jihad. Para napi teroris ini tersebar di sekitar duapuluh lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Sejak 1999, lebih dari 150 laki-laki dan satu perempuan sudah dibebaskan. Khusus pada periode 2006-2007 lebih dari 60 napi yang bebas. Banyak lagi yang lain juga akan kembali ke rumah mereka beberapa tahun mendatang.³ Program-program di penjara yang disusun secara hati-hati bisa memberi hasil nyata, dan polisi yang menangani counter-teror

² Untuk informasi lebih lanjut mengenai Jemaah Islamiyah lihat laporan Crisis Group yang lain, al: Laporan Asia N°63, *Indonesia: Status Jemaah Islamiyah Saat ini*, 3 Mei 2007; Laporan Asia N°114, *Terorisme di Indonesia: Jaringan Noordin Top*, 5 Mei 2006; Laporan Asia N°92, *Mendaur ulang Militan di Indonesia: Darul Islam dan Aksi Pengeboman Kedubes Australia*, 22 Februari 2005; dan Laporan Asia N°83, *Latar Belakang Indonesia: Mengapa Aliran Salafi dan Terorisme Sebagian Besar Tidak Bisa Sejalan*, 13 September 2004.

³ Kadang sering diasumsikan bahwa Indonesia baru mulai menangkap para tersangka teroris setelah bom Bali bulan Oktober 2002, tapi sebenarnya sejumlah anggota kelompok AMIN (kelompok ini memiliki hubungan dengan Darul Islam) ditangkap tahun 1999 atas serangkaian penyerangan di Jakarta; sejumlah anggota JI ditangkap dan diadili atas kasus bom malam Natal dan bom Atrium Senen tahun 2001; dan beberapa anggota kelompok Ring Banten, terkait dengan Imam Samudra, ditangkap tahun 2001 karena mengadakan latihan militer dengan senjata ilegal di Jawa Barat.

¹ Lihat bagian III dibawah.

selama ini sudah melakukan uji coba dengan beberapa pendekatan yang berbeda.⁴

Laporan ini disusun berdasarkan wawancara dengan petugas-petugas penjara, polisi dan bekas napi, maupun dari dokumen-dokumen luas.

II. LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Indonesia memiliki sekitar 400 lapas dan rutan di tingkat kabupaten, tetapi hanya sekitar duapuluh yang menahan lebih dari satu atau dua orang napi yang dihukum karena terorisme Islam radikal.⁵ Terbanyak ada di Lapas Cipinang, Jakarta, dimana sekitar 25 napi pelaku bom Bali, Marriott, kedubes Australia dan kasus-kasus lainnya ditahan.⁶ Enambelas napi yang lain, kebanyakan dari bom Bali II, ditahan di Lapas Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah. Jumlah yang hampir sama ditahan di penjara Kelas 1 Porong, Sidoarjo Jawa Timur, sebagian besar karena tindak kriminal di Maluku tahun 2005; mereka dipindahkan dari Ambon akhir Maret 2007. Lapas Kerobokan di Bali menahan sekitar belasan, dari bom Bali I dan II. Lapas Makassar di Sulawesi Selatan menahan lebih dari duapuluh, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas aksi pengeboman bulan Desember 2002 di restoran McDonald dan sebuah showroom mobil, selain itu juga para pelaku penyerangan sebuah kafe karaoke di sebuah kota kecil arah utara Makassar.

Sekitar duapuluhan anggota lokal yang terlibat dalam kekerasan di Poso tersebar di beberapa penjara di Sulawesi Tengah. Tiga pelaku utama bom Bali I, yang dijatuhi hukuman mati, sedang menunggu hari eksekusi di penjara Nusakambangan, penjara dengan

⁴ Ada dua unit kepolisian. Detasemen 88, yang dikenal dengan singkatan Densus 88, adalah bagian dari struktur formal Polri sebagai sebuah direktorat terpisah (Direktorat VI) dibawah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), dipimpin oleh Bekto Suprpto. Satuan Tugas Bom (Satgas Bom), sekarang dipimpin oleh Surya Darma, dibentuk setelah bom Bali I diluar stuktur formal dan melapor langsung ke Kapolri. Penangkapan terhadap banyak pimpinan JI, termasuk yang dilakukan pada bulan Maret dan Juni 2007, dilakukan oleh Satgas Bom, tapi yang mendapat pujian adalah Densus 88. Hubungan diantara kedua unit kadang tegang.

⁵ Pada awal tahun 2007, ada 207 lembaga pemasyarakatan (lapas) dan 190 rumah tahanan (rutan), rutan digunakan untuk menahan tersangka sebelum diadili, atau di beberapa kasus, napi terhukum yang sedang menunggu banding. Satu-satunya napi terorisme yang non-muslim adalah tujuhbelas napi Kristen yang membunuh dua pedagang ikan Muslim di Sulawesi Tengah pada bulan September 2006, sebagai reaksi atas eksekusi hukuman mati terhadap tiga orang warga Kristen yang dituduh berperan dalam pembunuhan massal terhadap Muslim di Poso bulan Mei 2000. Mereka didakwa dengan terorisme, bukan pembunuhan, karena pihak berwenang menyakini bahwa stabilitas politik di Poso tergantung pada memperlihatkan perlakuan yang seimbang dalam menerapkan undang-undang terorisme. Wawancara Crisis Group, jaksa Sulawesi Tengah, Palu, 2 Februari 2007.

⁶ Jumlah ini terus berubah, karena pembebasan, pemindahan dan penangkapan-penangkapan baru terus berlangsung. Pada bulan Juli 2007, Lapas Cipinang memiliki 31 napi kasus terorisme. Paling sedikit tiga orang dibebaskan setelah menerima remisi dalam rangka hari Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus, termasuk pimpinan senior JI yaitu Mustopha alias Abu Tholut dan Mohammed Rais, perwakilan JI di Kandahar, Afghanistan tahun 2000-2001. Tiga napi anggota KOMPAK menerima pembebasan bersyarat setelah hari Idul Fitri bulan Oktober 2007.

maksimum security yang terletak di Pantai Selatan Pulau Jawa.

Hingga bulan Oktober 2007, data pemerintah memperlihatkan ada 124 napi yang dipenjara karena terorisme, tetapi angka tersebut tidak termasuk mereka yang sudah ditangkap tapi belum diadili; kemudian mereka yang sudah diadili tapi karena berbagai sebab ditahan diluar sistem lembaga pemasyarakatan, contohnya di tahanan Polisi Daerah (Polda) Jakarta; atau para jihadis yang dihukum karena tindak kriminal, bukan terorisme.⁷ Beberapa tersangka teroris paling penting yang ditangkap bulan Januari, Maret dan Juni 2007 ditempatkan di tahanan polisi di Jakarta. Sekitar setengahnya adalah anggota JI; yang lainnya memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok yang lebih kecil seperti KOMPAK, Ring Banten, dan Laskar Jundullah-Makassar.⁸

A. KERANGKA HUKUM

Indonesia mengadopsi hukum baru mengenai lembaga pemasyarakatan pada tahun 1995, peraturan baru ini mengganti peraturan lama yang sudah diterapkan sejak 1971. UU ini menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dirancang untuk memastikan para napi menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁹ Di semua

peraturan-peraturan, instruksi presiden, keputusan menteri dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pemasyarakatan, focus terpentingnya adalah reintegrasi ke masyarakat.

Kebijakan dan manajemen lapas berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM (selanjutnya disebut departemen kehakiman). Ia mengawasi lembaga pemasyarakatan, rumah-rumah tahanan dan balai pemasyarakatan (BAPAS), yaitu institusi yang menangani pembebasan dengan jaminan. Kepala lembaga pemasyarakatan atau kalapas adalah pegawai negeri, yang bertugas melaksanakan program perawatan dan rehabilitasi tahanan, mengatur tata tertib, menjatuhkan dan memberikan hukuman disiplin bagi tahanan yang melanggar peraturan tata tertib dan menjaga agar tahanan tak melarikan diri.¹⁰ BAPAS mengatur persiapan dan program-program asimilasi (proses pembinaan napi yang dilaksanakan dengan membaurkan napi dalam kehidupan masyarakat); mengawasi cuti menjelang pembebasan (CMP); pembebasan bersyarat (PB); dan pembebasan penuh. Seluruh petugas pemasyarakatan wajib menghormati hak asasi para napi yang berada dibawah tanggung jawab mereka.¹¹ Meskipun *The UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Peraturan Minimum Standar PBB mengenai Perawatan Tahanan) tidak dikutip secara spesifik, jelas mereka telah memberi pencerahan kepada peraturan di Indonesia, karena seluruh napi berhak untuk melakukan ibadah, olah raga, kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran, makanan dan pelayanan kesehatan yang layak. Mereka berhak menerima kunjungan dari keluarga, dokter pribadi, penasihat hukum, rohaniwan, guru, pengurus dan/atau anggota organisasi sosial kemasyarakatan, dan mereka tetap mempunyai hak-hak politik. Meskipun mereka diijinkan akses terhadap buku-buku dan bahan bacaan lain yang sesuai dengan program perawatan tahanan maupun terhadap media elektronik, dalam hal tahanan membawa sendiri atau memperoleh dari orang lain bahan bacaan atau media elektronika seperti radio, tv, harus mendapat izin terlebih dahulu dari kalapas.¹² Namun dalam prakteknya, dengan sejumlah uang, para napi bisa mendapatkan hampir apapun yang diinginkan. Petugas jaga tahanan berwenang memeriksa dan/atau

⁷Wawancara Crisis Group, Dirjen Lembaga Pemasyarakatan Untung Sugiyono, Jakarta, 29 Oktober 2007. Sebagian besar yang dihukum atas keterlibatan dalam aksi teror dikenai pelanggaran Undang Undang tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau Undang Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak Ilegal. Namun dibebberapa kasus, dimana jaksa merasa tidak memiliki kasus yang cukup kuat untuk tuntutan terorisme, mereka menggunakan tuntutan lain seperti perampokan bersenjata, pemalsuan dokumen atau pelanggaran imigrasi.

⁸Lihat Appendix B dibawah. Tak satupun dari organisasi-organisasi yang lebih kecil memiliki hubungan organisasional formal dengan JI, tapi ada keterkaitan. Anggota-anggota JI, Ring Banten dan Laskar Jundullah memakai kamp latihan yang sama di Pendolo, Poso. Beberapa yang tadinya anggota pasukan dan donatur KOMPAK juga anggota JI, walaupun kemudian KOMPAK merubah identitasnya sama sekali. Anggota Ring Banten bekerja sama dengan JI di bom Bali I, dan dengan Noordin Moh. Top di bom kedubes Australia. Juga ada unit kecil Laskar Jundullah di Solo, Jawa Tengah, dibawah pimpinan Moh. Kalono, yang kadang bekerja sama dengan anggota lokal JI, tapi tidak ada hubungan organisasional dengan JI.

⁹ Pasal 1 dan 2, Undang-Undang no 12/1995 tentang Pemasyarakatan, 30 Desember 1995.

¹⁰Peraturan Pemerintah no 58/1999, Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

¹¹ Ibid, pasal 4(2).

¹² Ibid, pasal 35-36.

mengeledah pengunjung termasuk barang-barang bawanya.¹³

Struktur perjalanan atau tahapan bagi napi dari kedatangan hingga pembebasan disusun dalam sebuah peraturan terpisah, dengan fokus pada pembinaan terhadap pelaku tindak pidana agar menjadi orang yang lebih baik.¹⁴ Remisi atau pengurangan hukuman dapat diberikan kepada tahanan yang berkelakuan baik, meskipun seringkali berkantung tebal lebih penting daripada berkelakuan baik. Setelah mendapat protes keras dari masyarakat di Indonesia atas remisi yang diberikan kepada putra bungsu mantan Presiden RI alm. Suharto, Tommy Suharto (yang dihukum karena memerintahkan orang untuk melakukan pembunuhan terhadap seorang anggota hakim Mahkamah Agung). Selain itu ada juga protes dari pemerintah asing, seperti Australia, atas remisi kepada Abu Bakar Ba'asyir dan beberapa napi JI lain. Menanggapi protes ini, departemen kehakiman melakukan amandemen terhadap peraturan itu sebanyak dua kali yaitu pada 2006 dan 2007.

Saat ini pelaku tindak pidana biasa baru bisa memperoleh remisi apabila telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Tetapi mereka yang dihukum karena kasus terorisme, narkoba, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan pelanggaran HAM berat, tidak berhak mendapat remisi kecuali telah menjalani sepertiga dari masa tahanan dan hanya diberikan lewat keputusan resmi dari menteri kehakiman.¹⁵ Dan mereka baru berhak mendapatkan asimilasi setelah menjalani dua pertiga dari masa hukuman – meskipun napi yang dihukum karena kasus terorisme jarang mengikuti program semacam ini.¹⁶

Pemindahan narapidana dari satu lapas ke lapas yang lain, karena alasan keamanan atau yang lain, bisa

dilakukan dengan ijin dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat apabila dalam wilayah propinsi yang sama, atau dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam hal pemindahan dari propinsi satu ke propinsi lain. Keluarga wajib diberitahu, dan napi yang dipindahkan harus diberitahu sehari sebelum pemindahan.¹⁷ Napi yang dihukum karena tindak pidana terorisme seringkali dipindahkan untuk mengurangi kemungkinan perekrutan, tapi kadang untuk meningkatkan pengawasan dan kontrol, kadang sebagai hukuman, untuk memisahkan kelompok napi yang satu dengan yang lain, dan kadang sebagai hadiah, untuk memindahkan napi ke dekat keluarganya.

B. ORGANISASI DALAM PENJARA

Faktor penting yang mempengaruhi para napi adalah susunan kekuasaan di dalam komunitas mereka. Para napi yang telah menjalani sebagian dari hukuman mereka dan dipercaya oleh petugas penjara bisa diberi posisi yang membawa keuntungan-keuntungan seperti: makanan yang lebih baik, fasilitas yang lebih baik, kesempatan menghasilkan uang, atau semuanya. Semua penjara memiliki sistem ketua kamar yang melapor ke ketua blok. Sel yang diisi satu orang sangat jarang; biasanya sebuah sel penjara yang besar ditempati sekitar duapuluh atau lebih napi, dan banyak lapas, terutama di Jawa, yang sudah terlalu penuh.¹⁸ Sel penjara yang lebih baik bisa didapat dengan membayar sejumlah uang. Cipinang, lapas utama di Jakarta, menurut laporan beroperasi seperti hotel, dengan sel-sel “Super VIP”, VIP, deluxe dan standar, dengan harga masing-masing.¹⁹

Ketua kamar biasanya seorang preman yang memungut bayaran rutin dari para napi dibawahnya, mengatur peredaran barang dan membayar napi lain untuk mencuci pakaiannya, bersih-bersih, dan menyediakan

¹³ Ibid, pasal 39

¹⁴ Ibid OR Peraturan Pemerintah (PP) no. 31/1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tahapan hukuman tahanan dibagi menjadi tiga bagian. Tahapan pertama yaitu sejak kedatangan hingga selesai sepertiga dari masa hukuman, bulan pertama dari tahapan ini difokuskan pada observasi dan mengenal napi. Tahapan kedua selesai ketika setengah dari masa hukuman sudah dijalani. Tahapan ketiga berakhir ketika duapertiga dari masa hukuman sudah dijalani. Ketika itulah program pra-pembebasan dimulai dibawah pengawasan kalapas. Jenis program bagi napi berdasarkan pada laporan dari sebuah tim di bawah kantor lapas (pasal 9-11).

¹⁵ PP No 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan ini kemudian diamandemen lagi dalam sebuah Surat Edaran tertanggal 5 Oktober 2007 dari Dirjen Pemasyarakatan.

¹⁶ PP 28/2006, pasal 36-43.

¹⁷ PP 31/1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, 19 Mei 1999, pasal 53.

¹⁸ Menurut Departemen Kehakiman dan HAM, lapas dan rutan di Indonesia pada tahun 2006 memiliki kapasitas sebanyak 70,241 napi, namun dihuni 116,688 napi. Lihat www.depkmham.go.id/xdepkmhamweb/xunit/xditjenpemasy/statistik.htm. Lapas khusus narkotik di Cirebon berkapasitas 360 napi, dihuni 1,143 napi; Lapas Paledang di Bogor, Jawa Barat, berkapasitas 500, dihuni 1,639; dan Lapas Cipinang di Jakarta berkapasitas 1,500, dihuni 3,800. Lihat “Baseline Survey Penerapan Konsep Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan”, Partnership for Governance Reform, Juni 2007, hal. 50

¹⁹ “Menangguk Untung dari Bang Napi”, *Trust*, vol. 7, no. 44, hal. 11-13.

jasa lain, kadang juga seks.²⁰ Sebuah blok biasanya merupakan satu sisi dari sebuah gedung yang bisa terdiri dari enam atau delapan sel. Ketua blok menguasai napi lain, dan seringkali menuntut bagian dari kiriman apapun yang dibawa oleh keluarga atau teman yang mengunjungi mereka. Ia melapor ke seorang napi yang bertugas sebagai pemuka keamanan, dan juga ke sipir yang bersangkutan.

Napi bisa diangkat menjadi pengawas yang berhubungan dengan industri dalam penjara, administrasi, pendidikan, klinik kesehatan atau bidang lain – bahkan juga tempat parkir, bagi napi yang benar-benar bisa dipercaya, karena tugas ini berada diluar dinding penjara.²¹ Secara resmi pemuka berhak mendapat pengurangan hukuman sepertiga lebih banyak dari napi biasa. Setiap pemuka dapat dibantu oleh tiga orang napi yang disebut *tamping*.²² Di beberapa penjara, seorang *tamping* membawa napi dari sel mereka ke ruang besuk untuk menemui teman atau keluarga mereka, dan napi harus menyerahkan sejumlah uang kepada petugas yang berjaga disetiap pintu yang dilewati; di Lapas Cipinang, jumlahnya mungkin sampai lima pintu, masing-masing pintu antara Rp 5,000 hingga Rp 10,000.²³ *Tamping* kemudian membagi pendapatannya dengan ketua blok atau pemuka atau yang lain di dalam hirarki penjara yang lebih senior dari dia, dan juga kepada sipir.

Pada saat yang sama, keluarga yang mengunjungi tahanan seringkali harus membayar *tamping* dan juga petugas penjara untuk dapat masuk dan keluar, biayanya tergantung apakah mereka memakai ruang besuk biasa atau ruangan yang lebih nyaman, diluar jam besuk. Biaya ruangan yang kedua bisa sampai Rp 200,000 per kunjungan.²⁴ Selain itu ada napi yang ditunjuk menjadi *tamping* mesjid, tugasnya mendampingi tahanan dari sel ke mesjid lapas untuk shalat Jum'at. Setiap *tamping* dapat mempekerjakan empat atau lima napi yang lain.

Karena posisi pemuka dan *tamping* merupakan sumber uang, napi sering harus memberikan sejumlah uang untuk dapat ditunjuk. Biayanya untuk posisi pemuka di lapas Cipinang tahun 2007 menurut laporan sekitar Rp 3 juta, dibayarkan ke petugas penjara, dan jumlah posisi-posisi ini telah bertambah banyak. Contohnya tidak saja ada pengawas mesjid, tapi juga pengawas pembersihan mesjid.²⁵

Dirjen Pemasyarakatan mengatakan ia dapat memahami insentif untuk menjadi pemuka, karena proses remisi untuk posisi ini akan dipercepat, tetapi tidak ada insentif semacam itu buat seorang *tamping*, jadi ia meragukan bahwa posisi ini bisa diperjual belikan.²⁶ Namun kalau sudah ditunjuk sebagai *tamping*, seorang napi biasanya terjamin akan mendapat sebuah kasur untuk alas tidur, bukan tikar; sebuah sel yang didiami bersama empat atau lima napi lain, bukan duapuluh; makanan yang lebih baik; dan kemungkinan kenaikan pangkat sebagai pemuka.²⁷ Karena itu ada insentif kuat buat keluarga dan teman-teman napi untuk membeli posisi-posisi ini, dan napi teroris juga punya akses yang sama ke posisi ini seperti napi yang lain.

Salah satu sumber korupsi yang paling besar di penjara yaitu makanan. Lapas atau rutan biasanya mengontrakkan kepada perusahaan catering untuk menyediakan makanan dengan harga tetap untuk setiap napi per jatah makanan, dengan pungutan dilakukan oleh jasa catering dan penjara. Napi yang dipercaya sebagai kepala juru masak bisa mengambil pasokan makanan yang masuk dan menimbunnya, dan menjual porsi tambahan lauk misalnya, kepada napi yang mampu membayar. Pemotongan terhadap jatah makanan seringkali cukup serius sampai para napi harus bergantung pada makanan tambahan yang dibawakan oleh keluarga – oleh karena itu mereka yang ditahan jauh dari rumah berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, kecuali punya sumber dana lain. Pada tahun 2006, ongkos untuk mendapatkan makanan yang layak di Lapas Cipinang adalah Rp 300,000 per bulan; alternatif lain napi bisa membayar *tamping* dengan jumlah yang kurang lebih sama dan memperoleh sebuah kompor kecil sehingga mereka bisa memasak sendiri. Seorang bekas napi mengatakan *tamping*

²⁰ Sistem sel dan ketua blok berlaku sama di dalam rutan maupun lapas, baik penjara untuk napi laki-laki dan perempuan. Lihat “Rutan Tak Lagi ‘Hotel Prodeo’”, *Kompas*, 21 April 2007.

²¹ Peran pemuka diatur dalam sebuah Surat Edaran tahun 1964 dari Dirjen Pemasyarakatan (waktu itu disebut direktorat jenderal bina tuna warga), no JH 1/2049, 16 Desember 1964. Informasi mengenai pemuka tempat parkir berasal dari seorang bekas napi.

²² Surat Edaran no JH 1/2049, op.cit. Kata *tamping* artinya orang yang bekerja di lapas, tetapi napi-napi yang diwawancara berpikir *tamping* kependekan dari tahanan pendamping.

²³ Wawancara Crisis Group dengan bekas napi, Bogor dan Jakarta, September 2007; dan “1,001 Pungutan di LP Cipinang”, *Kompas*, 25 April 2006.

²⁴ “1001 Pungutan di LP Cipinang”, *Kompas*, 25 April 2006.

²⁵ Wawancara Crisis Group dengan bekas napi, Jakarta, September 2007.

²⁶ Wawancara Crisis Group dengan Dirjen Lembaga Pemasyarakatan Untung Sugiyono, Jakarta, 29 Oktober 2007.

²⁷ Wawancara Crisis Group dengan bekas napi, Palu, Juli 2007.

hanya memungut bayaran untuk diserahkan ke seorang petugas penjara.²⁸

Karena napi teroris sering memiliki sumber dana dari donatur perorangan atau dari organisasi yang bersimpati, kemampuan mereka untuk mendapatkan makanan yang lebih baik menjadi insentif tersendiri bagi napi tindak kriminal lain untuk bergabung dengan mereka. Salah satu taktik polisi untuk mengambil hati para napi jihadis yaitu dengan memastikan bahwa mereka paling sedikit mendapat jatah nasi yang bagus tiga kali sehari.

Pemerasan dengan dalih proteksi juga hal yang biasa di penjara Indonesia. Sudah merupakan hal yang rutin buat napi baru dipukuli oleh napi lain di dalam selnya sebagai semacam tradisi perploncoan. Biasanya hal ini bisa dihindari dengan membayar sejumlah uang. Keluarga napi yang cukup kaya seringkali menjadi target pemerasan, mereka diberitahu bahwa anggota keluarga mereka akan menderita kecuali mereka membayar uang, dan bayaran ini masuk ke kantong oknum petugas penjara dan partner napi mereka.²⁹ Mudah-mudahan menyogok banyak pegawai lapas ini memperkuat pemikiran para jihadis bahwa pegawai pemerintahan di Indonesia adalah thoghut.

Karna itu uang mempengaruhi apapun yang terjadi di penjara. Dibawah peraturan pemerintah tahun 2004, sebuah sistem bon dimaksudkan untuk mengganti peredaran uang tunai.³⁰ Namun pada prakteknya hal ini tidak membawa banyak perubahan dalam perekonomian di penjara. Uang tetap menjadi hal yang sangat penting untuk bisa bertahan, dan napi yang berkuasa— apakah itu bandar narkoba, koruptor atau teroris — adalah mereka yang bisa mempertahankan uang tetap mengalir. Hal ini juga berarti bahwa hirarki operasional jihadi bisa dipengaruhi oleh uang. Di Cipinang, seorang pimpinan JI bernama Adung, yang pernah menjabat sebagai pjs (pejabat sementara) *amir*

pada tahun 2003, menurut kabar pengaruhnya berkurang karena dia tidak punya sumber pemasukan tetap.³¹

C. GENG DAN KEKERASAN

Dinamika kehidupan penjara juga berkaitan dengan organisasi sosial para napi, terutama geng-geng. Setiap penjara punya kehidupan geng yang berbeda-beda. Namun di Cipinang kelompok yang sudah lama mendominasi yaitu Geng Arek, yang terdiri dari para kriminal dari Jawa, khususnya Jawa Timur. Seorang napi memperkirakan sedikitnya 70 persen napi Cipinang anggota Geng Arek. Selama bulan Juli 2007, mereka menguasai hampir seluruh ekonomi dalam penjara dan mendominasi posisi-posisi pemuka. Geng berpengaruh yang kedua yaitu Geng Korea dari Sumatra, sebagian besar dari kota Medan dan Palembang dan kebanyakan dari suku Batak.

Sampai tahun 2000, Geng Arek mengendalikan sebagian besar pungutan liar di dalam Lapas Cipinang; kemudian Geng Korea mengambil alih sebentar setelah pemimpin Geng Arek, Pak De (dihukum atas kasus pembunuhan), dibebaskan dari penjara.³² Tapi pada tahun 2001, Geng Arek merebut kembali kendali mereka dan menguasai Cipinang tanpa tandingan sampai pertengahan 2007, dibawah pimpinan (sejak tahun 2003) Sukamat alias Monte, 37, asal Surabaya yang dihukum duabelas tahun karena kasus perampokan dan pembunuhan.

Untuk melawan kedua geng ini, seluruh napi jihadis di Cipinang – dari JI, KOMPAK, dan beberapa faksi Darul Islam – bergabung kekuatan; dikenal sebagai “Geng Ustadz”. Mereka diperlakukan dengan hormat karena dianggap telah berani menghadapi tidak hanya Gang Arek tapi juga pemerintah Indonesia dan AS.³³ Pada pertengahan 2007, terjadi perpecahan diantara gang “ustadz” karena masalah pribadi, tetapi jelas bahwa hal ini akan dikesampingkan untuk sementara

²⁸ “1,001 Pungutan di LP Cipinang,” *Kompas*, 25 April 2006; dan wawancara Crisis Group dengan bekas napi, Jakarta, September 2007.

²⁹ Wawancara Crisis Group dengan bekas napi, Jakarta dan Bogor, September 2007. Sebuah artikel di majalah bisnis di Jakarta mengenai korupsi di Lapas Cipinang mewawancarai seorang petugas lapas yang mengatakan kolusi antara petugas dan napi adalah akibat dari hubungan emosional yang terbentuk selama bertahun-tahun diantara mereka. Lihat “Bisnis Timbul dari Hubungan Emosional”, *Trust*, vol. iv, no. 44 (Agustus 2006), hal. 14-20.

³⁰ Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan nomor E.PR.06.10-70 Tahun 2004 Tentang Bebas Peredaran Uang (BPU).

³¹ Wawancara Crisis Group dengan bekas napi, Jakarta dan Bogor, September 2007. Kebutuhan akan uang tidak berhenti ketika napi keluar dari penjara. Seorang anggota JI yang dibebaskan bersyarat awal tahun 2007 diikuti kemana-mana oleh petugas Parol dengan naik motor. Petugas tersebut minta uang bensin dari bekas napi ini.

³² Mohammad Siradjuddin, alias Pak De, seorang pensiunan ABRI, dihukum atas pembunuhan seorang model fashion yang sedang hamil, Dietje, pada tahun 1985. Dietje dides-desuskan adalah pacar dari salah seorang anak Soeharto. Ia dibebaskan bulan Desember 2000 setelah menjalani empatbelas tahun dari duapuluh tahun hukumannya.

³³ Wawancara Crisis Group dengan bekas napi, Jakarta, Juli 2007.

kalau ada kebutuhan untuk bergabung bersama menghadapi pemerasan dan penyerangan.³⁴

Semendesak apakah kebutuhan itu dapat dilihat pada bulan Juli 2007. Ketegangan antara Gang Arek dan para ustadz telah meningkat sejak dibebaskannya Abu Bakar Ba'asyir pada bulan Juni 2006. Menurut seorang napi, selama ada Ba'asyir, Geng Arek tidak mengganggu para napi jihadis, tampaknya karena menghormati Ba'asyir. Tapi setelah Ba'asyir bebas, para jihadis yang lebih muda, dan lebih keras kepala, menolak membayar pungutan yang ditarik para preman Arek untuk melewati pintu-pintu agar dapat menemui pembesuk. Mereka juga menolak ketika kelompok Arek menuntut bayaran dari jihadis untuk menggunakan musholla yang berada di salah satu blok yang dikuasai mereka.

Untuk menghukum penentangan ini, Arek memutuskan untuk menyerang. Pada tanggal 8 Juli, belasan napi yang dipersenjatai pisau, pedang dan senjata lain dan dikomandoi oleh Monte dan dua pimpinan Arek yang lain, yaitu Wili dan Slamet, menurut laporan memasuki musholla dan menyerang enam napi jihadis, sebagian besar dari KOMPAK, yang sedang shalat. Keenam napi tersebut berhasil menghalau para penyerang, dan wibawa mereka kontan membubung tinggi. (Aparat penjara tidak berbuat apa-apa; katanya mereka takut dengan Gang Arek).

Beberapa napi jihadis yang lain membahas kemungkinan melakukan serangan balasan, termasuk dengan cara bergabung kekuatan dengan geng-geng lain yang lebih kecil di Cipinang. Tapi sebelum mereka bisa melakukan apa-apa, kekuatan lain mencampuri. Pagi tanggal 31 Juli, Monte dan Slamet dibunuh di dalam sel mereka oleh beberapa anggota Geng Korea yang bersenjata pedang. Insiden ini diduga dipicu soal perebutan lahan perdagangan narkoba di dalam penjara.

Menurut kabar, Monte mendesak petugas penjara untuk memindahkan pemimpin Geng Korea (Bosar, kependekan dari bos besar), ke Nusakambangan, sebuah penjara yang terletak di pantai selatan Jawa, dimana para pentolan bandar narkoba dikerangkeng – dan dimana para pelaku bom Bali, Amrozi, Imam Samudra dan Mukhlas juga ditahan. Menurut laporan, Bosar menghasilkan begitu banyak uang dari perdagangan narkoba di dalam Lapas

³⁴ Salah satu perselisihan ini meliputi seorang napi yang sudah menikah dan mengambil istri kedua, adik dari seorang rekan napi, ketika ia masih di penjara. Ia langsung diasingkan, sebagian karena napi lain merasa kalau ada calon istri yang siap dinikahi di dalam kalangan mereka, seharusnya napi yang masih bujang yang harus diprioritaskan untuk menikah. (Waktu kunjungan istri/kunjungan *conjugal* dibolehkan di Cipinang dengan biaya perjam.)

Cipinang sampai melanggar wilayah kekuasaan Monte.³⁵ Dia juga bersekutu dengan geng lebih kecil yang terdiri dari preman Ambon dan Flores melawan Gang Arek.

Sehari setelah insiden penyerangan itu, pejabat lapas memindahkan 192 napi dari penjara biasa ke penjara khusus narkoba di kompleks Lapas Cipinang. Sementara 40 napi dari geng lawan, termasuk semua ketua blok, dipindahkan ke penjara-penjara di Jawa Barat.³⁶ Para pejabat berwenang lapas saat ini percaya bahwa kekuatan kelompok preman Jawa di Cipinang sudah dihancurkan.³⁷

Kenyataan bahwa dua orang yang terbunuh dalam insiden ini merupakan pimpinan dari aksi penyerangan terhadap sejumlah jihadis tiga minggu sebelumnya menimbulkan teori-teori konspirasi. Beberapa napi ustadz, walaupun mereka lega bahwa musuh mereka telah mati, yakin bahwa intel yang beroperasi di dalam penjara lah yang telah memicu perkelahian, dan berharap mereka akan ikut ambil bagian untuk membalas dendam terhadap Geng Arek, sehingga memberi alasan bagi petugas penjara untuk memisahkan kelompok mereka dan memindahkan ke lapas-lapas lain sebagai hukuman.³⁸ Tidak ada bukti yang mendukung hal ini, tetapi kejadian tersebut tampaknya telah semakin mengukuhkan solidaritas diantara para napi jihadis.

Selama ada kebutuhan untuk perlindungan dari kelompok lain menciptakan insentif untuk mempertahankan solidaritas, maka upaya untuk meyakinkan secara individu lewat pendekatan ideologi atau pragmatis mungkin akan gagal. Salah seorang yang terlibat dalam program deradikalisasi polisi mengatakan bahwa beberapa napi II kelihatannya memberi tanggapan yang baik terhadap pendekatan secara individu, selama mereka ditahan di rutan Polda Jakarta, sebuah lingkungan yang lebih mudah dikontrol. “Tetapi semua upaya baik kita langsung lenyap ketika mereka dipindahkan ke Cipinang”, katanya.³⁹

³⁵ Sebuah artikel mengutip sebuah sumber di dalam penjara yang tidak disebutkan namanya mengatakan pendapatan Bosar dari perdagangan narkoba setiap harinya mencapai Rp 40 juta. “Rebutan Lahan Pemalakan 2 Napi LP Cipinang Tewas”, *Pos Kota*, 1 Agustus 2007.

³⁶ 232 Napi Cipinang Dipindahkan”, *Suara Pembaruan*, 1 Agustus 2007.

³⁷ Wawancara Crisis Group dengan Dirjen Lembaga Pemasyarakatan Untung Sugiyono, Jakarta, 29 Oktober 2007.

³⁸ Wawancara Crisis Group, Jakarta, Agustus 2007.

³⁹ Wawancara Crisis Group, Jakarta, September 2007. Sebuah pemindahan besar-besaran terhadap napi II dari Polda Jakarta

D. STAF PENJARA

Ketika ketidakmampuan penjaga lapas Cipinang mencegah bentrokan yang terjadi pada bulan Juli muncul ke permukaan, petugas penjara seringkali kekurangan tenaga pengamanan dan tidak memiliki training yang cukup untuk menghadapi kejadian yang tidak biasa dan memang sering lebih sibuk dengan kegiatan mencukupi gaji mereka yang pas-pasan dengan cara memeras atau berkolusi dengan napi. Di Lapas Cipinang ada sekitar 3,800 napi, sementara jumlah sipir penjara hanya 42 orang dalam satu shift.⁴⁰ Pengangkatan sipir baru hanya dilakukan sekali setahun, dan tingkat pensiunan lebih tinggi dari jumlah pegawai baru yang masuk. Gaji per bulannya rata-rata Rp 2 juta, yang mana jumlah itu hampir tidak bersisa setelah dipotong biaya transport dan kebutuhan sehari-hari.⁴¹

Setelah seorang sipir di penjara Bali berubah menjadi seorang jihadi karena sering berhubungan dengan para pelaku bom Bali, manajemen lapas mulai agak lebih memperhatikan masalah yang melibatkan para napi teroris. Dan jalan keluar jangka pendek mereka untuk menyetop upaya perekrutan yaitu dengan mencoba menugaskan sipir non-Muslim untuk menjaga blok para napi teroris, namun hal ini tidak selalu memungkinkan.⁴² Di Semarang, salah satu lapas yang dijalankan dengan lebih baik, kalapas mengatakan bahwa para petugas yang menjaga blok napi teroris dipilih secara khusus, tetapi tidak jelas pelatihan tambahan semacam apa yang mereka terima.

Sebuah survey yang dikeluarkan bulan Juni 2007 mengenai penjara di Indonesia mencatat bahwa ada sebuah Akademi Ilmu Pemasyarakatan atau AKIP, yang berada di bawah naungan departemen kehakiman, yang lulusannya agak lebih siap dalam pekerjaan mereka dari pada petugas lain, tetapi jumlah mereka sangat sedikit diantara para pegawai penjara. Kebanyakan staf penjara awalnya melamar untuk menjadi pegawai negeri di bagian lain di departemen kehakiman; tapi ketika mereka ternyata ditugaskan untuk bekerja di lapas/rutan, spirit dan motivasi mereka langsung turun.⁴³

Tetapi yang kurang persiapan dalam menghadapi napi teroris bukan hanya para sipir. Ketika seorang napi

baru dikirim ke penjara, kepala lapas/rutan biasanya hanya menerima selebar kertas dari pengadilan yang berisi ringkasan dari putusan dan hukuman. Seringkali tidak ada informasi detil mengenai napi baru tersebut dan tidak ada indikasi apakah perhatian khusus terhadap napi ini diperlukan atau tidak, seperti dalam kasus para napi jihadis. Baru-baru ini para kepala lapas/rutan mulai diikutsertakan dalam kursus pelatihan counter-terror yang dirancang untuk polisi dan jaksa, tetapi masalah tidak memadainya dan kurangnya petugas yang terlatih masih berlanjut.

ke Cipinang terjadi pada bulan Januari 2007 untuk memberi tempat bagi gelombang tahanan baru dari Poso.

⁴⁰ “Bisnis Timbul dari Hubungan Emosional”, op. cit. Jumlah ini dikutip dari angka tahun 2006.

⁴¹ Ibid.

⁴² Wawancara Crisis Group dengan Dirjen Lembaga Pemasyarakatan Untung Sugiyono, Jakarta, 29 Oktober 2007.

⁴³ “Survey Baseline”, op.cit., hal. 33.

III. ISOLASI ATAU INTEGRASI?

Masalah yang harus dihadapi setiap pemerintah adalah apakah sebaiknya memperlakukan napi teroris secara berbeda dan terpisah dari napi lain, atau membolehkan mereka berbaur dengan yang lain. Sebuah studi memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah Inggris yang memisahkan para napi IRA di dalam sebuah blok terpisah akhirnya malah mempertahankan hirarki organisasi dan memudahkan munculnya kamp-kamp training yang dioperasikan dari dalam penjara:

Baru ketika pihak berwenang memutuskan bahwa para teroris seharusnya diperlakukan sesuai tindakan kriminal yang mereka perbuat, bukan menurut ideologi yang telah memotivasi mereka, maka penggunaan penjara sebagai kampus teroris mulai dibatasi.⁴⁴

Pelajaran yang didapat tampaknya yaitu bahwa integrasi lebih baik dari segregasi, tetapi ada kerugiannya juga. Kalau kejadian di Cipinang memperlihatkan bagaimana solidaritas diantara para jihadis bisa tumbuh dalam menghadapi geng-geng kriminal, sebuah contoh kejadian di sebuah penjara di Bandung dibawah ini, memperlihatkan bagaimana integrasi memberi ideologi kesempatan untuk melakukan perekrutan. Hikmahnya bukan integrasi berarti salah, tetapi setiap kasus perlu dipertimbangkan secara sendiri-sendiri.

Di Indonesia tidak hanya ada satu strategi, meskipun ada kebijakan umum bahwa para napi yang menjadi ancaman bagi keamanan dalam penjara sebaiknya dipisahkan dari yang lain; ini termasuk para pelaku kejahatan narkoba dan mereka yang dituduh terlibat terorisme.

Sebuah penjara di Semarang telah mengisolasi seluruh napi terorisnya, yang sebagian besar terlibat dalam perencanaan bom Bali II bulan Oktober 2005. Alasannya dapat dipahami, yaitu: untuk mencegah mereka mempengaruhi napi yang lain. Tetapi kebijakan ini tidak membedakan antara yang *hardcore* dengan yang lebih mudah direhabilitasi. Diantara mereka yang ditempatkan dalam blok terpisah ketika Crisis Group mengunjungi lapas tersebut pada bulan April 2007 adalah dua anggota JI yang masih muda, yang ditangkap bulan Juli 2003 ketika sebuah rumah yang digunakan untuk menyembunyikan persenjataan dan buku petunjuk pelatihan ditemukan. Keduanya pernah berlatih di Mindanao tapi belum ada yang pernah

terlibat dalam kekerasan; tugas mereka waktu itu menjaga tempat persembunyian.

Kepala lapas mengatakan bahwa selama dipenjara bersama dengan tahanan lain mereka telah menjadi napi teladan, tetapi ketika keputusan diambil untuk mengisolasi para napi teroris dari tahanan yang lain, ia tidak ada pilihan lain kecuali menempatkan mereka di blok khusus napi teroris. Sebagai akibatnya mereka ditahan bersama dengan orang-orang yang terlibat dalam perencanaan bom Bali II, diantaranya para pengikut Noordin Mohammed Top yang paling militan. Bahayanya adalah bahwa mereka akan terpengaruh menjadi radikal, dan satu-satunya hal yang positif yaitu bahwa hukuman mereka sebentar lagi akan habis, sehingga kontak mereka dengan ideologi tersebut menjadi terbatas.⁴⁵

Persoalan yang sama mungkin juga akan timbul berkenaan dengan sebuah kelompok dari Ambon, yang dihukum terkait dengan serangkaian aksi penyerangan antara tahun 2003 dan 2005 terhadap polisi dan target sipil yang lain. Karena khawatir kelompok ini berhasil merekrut para penjahat biasa di penjara Ambon, polisi dan pihak berwenang setempat mengirim enambelas napi ke Jawa pada akhir Maret 2007 dengan maksud untuk memindahkan mereka ke penjara dengan keamanan maksimum di Nusakambangan – yang dikenal sebagai Alcatraz-nya Indonesia – dimana Amrozi, Imam Samudra dan Mukhlas ditahan saat ini.⁴⁶

Tapi ternyata disana tidak ada tempat, sehingga para napi Ambon ditempatkan sementara di Lapas Wirogunan di Yogyakarta, Jawa Tengah. Beberapa minggu kemudian, mereka dipindahkan lagi ke sebuah penjara di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, karena Wirogunan sudah kepenuhan. (Tidak jelas mengapa kondisi di Nusakambangan dan Wirogunan tidak bisa diketahui terlebih dahulu sebelum para napi meninggalkan Ambon). Tapi kelihatannya tidak mungkin bahwa lebih dari empat atau lima orang dari enambelas napi bertanggungjawab terhadap upaya indoktrinasi, dan mungkin akan lebih bijaksana untuk tetap menahan mereka di Ambon, sehingga bisa dekat dari teman dan keluarga daripada mengambil resiko mereka menjadi lebih radikal karena terpaksa berada dalam satu lingkungan dengan rekan mereka yang lebih militan.

⁴⁵ Wawancara Crisis Group, Semarang, Juni 2007.

⁴⁶ Kompleks Lapas Nusakambangan terdiri dari lima lapas: Permisan, dibangun tahun 1908; Batu, dibangun tahun 1929; Kembang Kuning, dibangun tahun 1950; dan sebuah lapas baru dengan “fasilitas keamanan super maksimum”, yang dibuka bulan Juni 2007 dan memiliki 254 napi, sebagian besar pelanggar berat narkoba. Lihat dua buah artikel “Mengunjungi Lapas ‘Supermaximum Security’ di Nusakambangan”, *Indopos*, 4 dan 5 September 2007.

⁴⁴ Ian M. Cuthbertson, “Prisons and the Education of Terrorists (Penjara dan Pendidikan buat Teroris)”, *World Policy Journal*, Fall 2004, hal. 16.

Sebuah aspek dari perekrutan dalam penjara yang kadang terlupakan yaitu bahwa ia berlaku dua arah. Jadi tidak hanya jihadis yang mencoba mendekati napi lain untuk merangkul mereka secara ideologi, tapi juga para napi kadang melihat bergabung dengan kelompok jihadis merupakan sebuah strategi untuk bisa bertahan, sebuah cara untuk menjamin jatah makanan yang lebih baik, proteksi atau status.⁴⁷ Seorang pelaku pemerkosa di Lapas Cipinang menurut laporan memberitahu rekan selnya bahwa ia dihukum atas kasus terorisme karena ia pikir akan lebih dihormati.⁴⁸

A. LAPAS KEROBOKAN, BALI

Lapas Kerobokan di Bali memberi sebuah studi kasus menarik dalam hal perekrutan. Lapas ini menjadi tempat tiga pelaku utama bom Bali, Amrozi, Imam Samudra dan Mukhlas, ditahan hingga setelah bom Bali II bulan Oktober 2005, kemudian mereka dipindahkan ke Nusakambangan. Meskipun agak diisolasi, pengaruh mereka terhadap napi lain dan para sipir sangat dalam. Bagaimana mereka berhasil menarik pengikut disini menjadi pelajaran penting, karena proses yang sama hampir pasti juga terjadi ditempat lain.

Ahmed (bukan nama sebenarnya), napi yang ditangkap karena kasus germo dan narkoba pada tahun 2001, dipenjara di Kerobokan ketika tiga pelaku utama bom Bali ditahan disana. Dia bilang dia pikir hidupnya sudah berakhir ketika dia dikirim ke penjara, tapi ternyata tidak ada yang berubah. Selama dia punya uang, dia tetap bisa memperoleh minuman maupun narkoba dari dalam Kerobokan seperti diluar. Satu-satunya pertanyaan adalah bagaimana cara mendapatkan uang. Ia mulai mengerjakan cucian untuk para napi “boss” – ketua sel dan ketua blok – dan pada hari baik dia bisa mengumpulkan sampai Rp 50,000, cukup untuk bisa ikutan dalam pesta-pesta yang dibantu difasilitasi oleh para sipir asalkan memberi sejumlah uang.

Setelah beberapa lama, ia mulai bosan dengan rutinitas ini dan mencari hal lain yang bisa dilakukan. Ia mendekati napi lain yang menjadi tamping mesjid, dengan membantunya membersihkan mesjid dan melakukan pekerjaan kecil yang lain. Ketika para pelaku bom Bali tiba di lapas akhir tahun 2002, ia sudah menjadi tamping mesjid, dan dipercaya untuk membukakan sel-sel mereka yang ingin shalat Jum’at.

Dengan cara ini, ia mengenal seluruh napi yang Muslim, termasuk para napi JI, meskipun mereka ditahan di sayap yang terpisah. (Karena Kerobokan ada di Bali, kebanyakan dari para kriminal yang ditahan adalah pemeluk agama Hindu).

Ia melihat kelompok JI lebih simpatik dari napi lain:

Mereka selalu membela napi Muslim yang lain dan mendahulukan kepentingan orang lain, dengan cara yang membuat napi lain dan beberapa sipir Muslim bersimpati. Beberapa napi yang sering ke mesjid dengan ramah akan diberi nasihat, biasanya dimulai dengan nasihat mengenai bahaya rokok. Saya waktu itu sedang merokok ketika pertama kali bertemu dengan Amrozi. Ia menasihati untuk mengurangi, dan saya sangat terkejut – Amrozi sudah memperhatikan saya! Setelah itu saya mulai sering ngobrol dengan dia mengenai Islam.⁴⁹

Ahmed kemudian mulai membuka usaha dengan Amrozi dan seorang napi JI yang lain, berjualan voucher handphone. Napi JI ini yang punya modal dan kontak di luar penjara untuk membeli pulsa Prabayar, sementara Ahmed memiliki akses ke calon customer diantara para napi lewat tugasnya sebagai tamping mesjid. Ia dan dua rekan dagangannya menyisihkan 40 persen dari keuntungan mereka untuk mesjid, sisanya dibagi tiga.⁵⁰ Jelas sekali bahwa saat itu tidak ada kontrol yang berarti terhadap penggunaan handphone; sekali waktu pernah salah seorang rekan dagang Ahmed memiliki limabelas handphone di selnya.⁵¹

(Dalam sebuah razia pada bulan Februari 2007, petugas Kerobokan menemukan 51 handphone, termasuk sepuluh buah milik para napi teroris, beberapa diantaranya handphone canggih.⁵² Hasil razia ini sudah hampir pasti hanya sepersekiian dari jumlah total handphone yang dipakai dalam lapas. Masalahnya yaitu petugas sudah mengumumkan sehari sebelumnya bahwa para napi yang tidak menyerahkan handphone mereka akan dikenai sanksi – jadi hal ini memberi waktu yang cukup untuk menyembunyikan handphone mereka. Meskipun petugas menemukan handphone di pot-pot bunga dan dibelakang toilet, namun para napi dalam

⁴⁷ Fenomena kriminal yang bergabung dengan geng Islamis untuk mendapat perlindungan tertuang dalam “Out of the Shadows: Getting Ahead of Prisoner Radicalization”, Homeland Security Policy Institute of George Washington University and Critical Incident Analysis Group, 2006, hal. 4

⁴⁸ Wawancara Crisis Group, Jakarta, Agustus 2007.

⁴⁹ Wawancara Crisis Group dengan bekas napi, Jakarta, 12 Juli 2007.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

⁵² “10 Ponsel Pelaku Bom Bali II Disita”, *Indopos*, 9 Februari 2007. Mohamad Cholily punya Nokia 3315; Masykur Abdul Kadir, Nokia 3310; Abdul Aziz, Nokia 3105; Junaedi, Nokia 2100; Andi Hidayat, Nokia 3315; Anif Solchanudin dan Sarjiyo alias Sawad, Samsung CDMA N356; Dwi Widyarto alias Wiwid, Sanex CDMA SC 5010; Abdul Rauf, Siemens; Abdul Ghoni alias Umar Wayan, Nokia 8310.

hal ini seringkali lebih lihai daripada yang melakukan razia.)

Para napi teroris umumnya punya tiga kualitas kunci yang membuat mereka menarik bagi para napi kriminal biasa, yaitu: akses terhadap uang, dari berbagai donatur yang bersimpati; sebuah idealisme yang tampaknya dihargai oleh penjahat tangguh; dan kemauan untuk bertempur. Seperti halnya martabat para napi “ustadz” di Cipinang membubung tinggi ketika berhasil menghalau Gang Arek, sebuah momen yang menentukan di Kerobokan datang pada akhir tahun 2004 yaitu ketika sebuah kelompok napi preman Bali menyerang tiga anggota Ring Banten, sebuah kelompok Darul Islam yang berbasis di Jawa Barat yang bergabung dengan JI dalam bom Bali I. Ahmed dan seorang napi lain, Hardi (bukan nama sebenarnya), seorang pengedar narkoba yang menjadi murid Imam Samudra, ikut membela mereka, dan bersama-sama mereka berhasil mengalahkan para napi preman. Segera berita mengenai kejadian ini menyebar di antara para napi di penjara, dan kelima orang itu menjadi disegani.

Setelah perkelahian itu, petugas lapas memindahkan Ahmed dan Hardi ke penjara yang jauh lebih kecil di Bali dimana mereka dimasukkan ke dalam sel isolasi selama seminggu. Akhirnya mereka kemudian dipindahkan kembali ke Kerobokan, dimana mereka semakin intensif belajar dengan guru JI masing-masing. Keduanya sekarang sudah bebas. Ahmed bekerja sebagai guru part-time di sebuah sekolah JI, dan jelas dia melihat pertemuannya dengan pelaku bom Bali sebagai sebuah pengalaman positif yang meluruskan hidupnya. Menurut laporan, Hardi juga terlibat dalam sebuah dakwah agama yang sangat militan di Aceh.⁵³ Tapi seperti banyak penjahat biasa yang kemudian menjadi jihadis di dalam penjara, ia tidak dimonitor oleh yang berwenang sejak bebas dari penjara.

Seperti Hardi, mereka yang di Kerobokan dan berguru pada Imam Samudra tampaknya telah mengadopsi kemilitansian Imam Samudra. Contoh lain yaitu Beni Irawan, sipir lapas Kerobokan yang pada tahun 2006 didakwa menyelundupkan sebuah laptop ke dalam sel Imam Samudra. Saat itu berita-berita mengenai penangkapan Beni seluruhnya berfokus pada bagaimana Imam Samudra menggunakan laptop dalam perencanaan bom Bali II. Berita mengenai Beni sendiri dan bagaimana ia bisa menjadi seorang “saudara” yang dipercaya oleh pelaku bom Bali tidak terlalu banyak. Sejauh ini pejabat lapas di Semarang, dimana ia sekarang menjalani hukuman penjara selama lima tahun, mengatakan ia merupakan napi yang paling

militan, dengan semua antusiasme dan dedikasi yang biasanya dimiliki seorang muallaf.⁵⁴

Bagi Ahmed dan napi lain yang dipenjarakan karena kasus narkoba, Beni dikenal sebagai seorang sipir yang baik hati, karena dengan sedikit uang, ia akan membiarkan mereka minum-minum dan mengadakan pesta narkoba di sebuah ruangan di dalam lapas (sebelum ia menjadi seorang jihadis militan).⁵⁵ Ia juga mengizinkan para napi menggunakan rumahnya sebagai tempat penitipan bagi keluarga atau rekan mereka yang ingin mengirimkan sesuatu kepada para napi. Laptop Imam Samudra juga sebelumnya dikirim ke rumahnya. Para penjaga dan sipir di lapas-lapas dan rutan di seluruh Indonesia sangat rentan terhadap sogokan dan penyyuapan karena gaji mereka yang rendah dan kurangnya pelatihan, dan pengalaman dengan Beni menjadi sebuah *wake-up call* bagi pemerintah bahwa pegawai lapas seharusnya dipilih dan diawasi dengan lebih hati-hati.

B. AMAN (OMAN) ABDURRAHMAN

Kasus Aman Abdurrahman alias Oman alias Abu Sulaiman memperlihatkan bermacam dinamika yang terjadi antara para kriminal dan jihadis di penjara. Oman, seorang ustadz di Yayasan al-Sofwa, sebuah institut salafi di Jakarta ditangkap pada bulan Maret 2004 karena mengadakan latihan merakit bom di Cimanggis, di pinggiran Jakarta. Sebuah ledakan yang terjadi secara tidak disengaja menghancurkan atap rumah dimana pelatihan sedang berlangsung, dan sebagian besar peserta ditangkap.⁵⁶ Oman ditangkap dan dihukum tujuh tahun penjara pada bulan Februari 2005. Setelah kurang dari setahun di penjara Krawang, Jawa Barat, ia kemudian dipindahkan ke sebuah penjara peninggalan jaman Belanda di Bandung, yang dikenal sebagai Lapas Sukamiskin.

Di Sukamiskin, Oman satu-satunya napi yang dihukum karena kasus terorisme, meskipun bukan satu-satunya jihadis. Salah seorang pelaku bom malam Natal tahun 2000, seorang korlap JI yang dihukum karena melanggar UU Darurat No 12/1951 tentang kepemilikan bahan peledak secara ilegal, juga ditahan disitu. Pada awal tahun 2006, Yuli Harsono, seorang bekas prajurit TNI yang didakwa memberi pelatihan militer kepada para jihadis dengan menggunakan peluru yang dicuri dari

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Wawancara Crisis Group dengan petugas lapas, Semarang, 31 Mei 2007.

⁵⁵ Wawancara Crisis Group dengan bekas napi, Jakarta, 12 Juli 2007.

⁵⁶ Laporan Crisis Group, *Indonesia Backgrounder (Latar Belakang Indonesia)*, op. cit., hal. 27-28.

gudang senjata TNI AD yang seharusnya ia jaga, juga dipenjara di Lapas Sukamiskin.⁵⁷

Oman sendiri sejauh yang diketahui tidak ada hubungan dengan JI sebelum ditangkap. Ia sebagian besar dikenal karena kemampuan bahasa Arabnya yang sangat bagus, karena sebelumnya ia pernah menjadi murid terbaik di LIPIA Jakarta, salah satu institusi terkenal dalam hal penyebaran pemikiran salafi. Ia sudah mulai menterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia risalah-risalah yang ditulis oleh ideologis radikal dari Timur Tengah, terutama tulisan Abu Muhammad al-Maqdisi, dari Yordania, yang dikenal sebagai gurunya al-Zarqawi, orang yang bertanggung jawab atas beberapa dari aksi-aksi teror yang mengerikan di Iraq. Al-Zarqawi menyebut organisasinya Jamaah Tauhid Wal Jihad. Oman menamai organisasinya dengan nama yang sama.⁵⁸ Selain belajar merakit bom, kelompok ini belum pernah menyatakan bertanggung jawab atas tindak kekerasan, walaupun salah seorang anggotanya mungkin pernah terlibat dalam percobaan pembunuhan terhadap seorang muslim yang pindah agama Kristen,

⁵⁷ Iqbaluzzaman alias Iqbal alias Didin Rosman sedang menjalani hukuman duapuluh tahun penjara di Sukamiskin, atas tuduhan melanggar Undang Undang Darurat no 12/1951 tentang kepemilikan dan penggunaan bahan peledak ilegal. Dia mungkin anggota Darul Islam, bukan JI, tapi bekerja sama dengan Hambali dalam operasi bom malam Natal. Yuli Harsono juga dikenai Undang Undang Darurat no 12/1951 dan dihukum empat tahun penjara setelah dipecah dengan tidak hormat dari TNI. Latihan yang ia adakan berlangsung di Tawangmangu, diluar kota Solo, Jawa Tengah, diikuti sekitar 35 orang dan dibubarkan oleh polisi pada bulan Mei 2004. Dikoordinasi oleh Djarot Supriyanto dari Pesantren Isykarima, sebuah pesantren JI, katanya disponsori oleh sebuah kelompok bernama Generasi Islam Pecinta Alam, tapi sebenarnya oleh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), sebuah kelompok yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir. Amunisi, senjata, dan bahan-bahan merakit bom ditemukan di barak Yuli dalam operasi polisi bulan Juni 2005; juga ditemukan sebuah manual TNI tahun 1956 mengenai cara membuat ranjau (*land mine* dan *booby traps*). Yuli juga memberi pelatihan militer kepada anggota-anggota baru MMI di masjid al-Sunnah di Bandung. Lihat “Khianati TNI, Praka Yuli Divonis 4 Tahun Penjara”, *Pikiran Rakyat*, 3 Maret 2006 dan “Polisi Periksa Warga Terkait Kemah MMI”, *Koran Tempo*, 26 Mei 2004.

⁵⁸ Kelihatannya kelompok Oman sebelumnya bernama al-Muwwahidun dan ada hubungan dengan Darul Islam dan Ring Banten lewat seorang veteran Ambon dan Poso, Nazaruddin Muchtar alias Harun, yang ditangkap atas keterlibatannya dalam serangan terhadap polisi di Loki, Seram Barat, Maluku, bulan Mei 2005. Harun adalah salah seorang yang pertama kali merekrut Heri Golun, pelaku bom bunuh diri di kedubes Australia. Lihat laporan Crisis Group, *Recycling Militants in Indonesia (Mendaur ulang Militer di Indonesia)*, op. cit., hal. 10. Tidak jelas kapan Oman merubah nama kelompoknya menjadi Jama'ah Tauhid wal Jihad, tapi kemungkinan setelah ia ditangkap.

diluar kota Bandung pada bulan Oktober 2006.⁵⁹ Tapi fokus sebenarnya dari Jamaah Tauhid wal Jihad adalah penerbitan.

Di Sukamiskin, seperti halnya di Lapas Krawang sebelumnya, pengunjung akan membawakan Oman cetakan dari situs berbahasa Arab, termasuk tulisan-tulisan al-Maqdisi. Dengan memakai nama Abu Sulaiman (Sulaiman adalah nama dari anak pertamanya), ia akan menulis hasil terjemahan dengan tulisan tangan, dan kemudian tulisannya itu akan diambil oleh orang yang mengunjunginya. Hasil terjemahannya mula-mula muncul di beberapa situs jihadi Indonesia, satu situs dikelola oleh pengikutnya, dan paling sedikit satu lagi terkait dengan JI. Lama-lama mereka mulai tampil dalam bentuk buku yang menarik, dicetak oleh perusahaan-perusahaan penerbitan di Solo dan Jakarta yang terkait dengan JI. Banyak dari buku-buku tersebut yang isinya berfokus pada gagasan mengenai pemerintahan yang thoghut di negara-negara Muslim sebagai musuh utama Islam.

Para petugas lapas tidak menyadari kegiatan penerbitan Oman sampai bulan April 2007, ketika mereka diperlihatkan buku-buku dan cetakan dari tulisan Oman di internet dengan mencantumkan *dateline* penjara. Para petugas mengatakan bahwa pengunjung lapas selalu diperiksa apakah mereka membawa narkoba, senjata atau benda tajam lain, tetapi barang-barang cetakan tidak terlalu diperhatikan. Kalau barang-barang

⁵⁹ Korbannya adalah seorang pastor Protestan evangelis dari Lamongan, Jawa Timur, yang pindah dari agama Islam dan bekerja dengan sebuah organisasi bernama Yayasan Dian Kaki Emas, yang juga dipimpin oleh seorang Muslim yang pindah agama. Organisasi ini sudah lama menjadi target kelompok Muslim, karena dianggap mempropagandakan kemurtadan. Satu orang ditangkap tak lama setelah penyerangan, yaitu: Sultan Qolbi alias Ustadz Arsyad, yang ditangkap di Lembang, diluar kota Bandung, pada tanggal 17 Oktober 2006. Tapi baru beberapa bulan kemudian polisi menyadari bahwa mereka menahan bukan kriminal biasa. Arsyad, seorang Madura, adalah pemimpin KOMPAK di Ambon, dicari terkait dengan aksi penyerangan pada bulan Mei 2005 terhadap pos polisi di Loki, Ceram Barat, Maluku, yang menewaskan enam orang. Ia akhirnya dipindah dari Bandung ke Ambon untuk diadili dan dibebaskan dari tuduhan penyerangan di Loki, tapi divonis bersalah dalam penembakan terhadap sebuah kapal motor di perairan dekat pulau Buru, Maluku. Ia kabur ke wilayah Bandung sekitar bulan Agustus 2005. Hubungannya dengan Oman adalah lewat Harun (lihat catatan kaki sebelumnya). Karena ia sekarang sudah dihukum untuk aksi penyerangan di Maluku, kemungkinan ia diadili untuk kasus percobaan pembunuhan di Bandung sangat kecil. Kaki tangannya dalam aksi serangan itu masih buron, dan salah satu diyakini adalah pengikut Oman.

cetakan itu dalam bahasa Arab, kata mereka, siapa diantara kita yang akan mengerti?⁶⁰

Tetapi kegiatan penterjemahan ini menjadi hal yang penting, karena berarti reputasi Oman naik diantara kelompok jihadi yang sebelumnya hampir tidak pernah mendengar tentang keberadaannya sebelum dia ditangkap. Sampai akhir tahun 2005, kalangan JI yang paling militan mulai mencarinya, dan ia kemudian menterjemahkan sebuah buku bersama-sama dengan Lutfi Hudaeroh alias Ubeid, yang ditahan karena menjadi kurir Noordin Mohammed Top. Pada saat itu Lutfi dipenjarakan di Lapas Cipinang, dan sekarang sudah bebas.⁶¹

Selain kegiatan menulisnya, Oman juga menjalankan pelajaran agama lewat handphone dari Sukamiskin ke berbagai kelompok diluar Sukamiskin, termasuk ke para pelaku bom kedubes Australia di Lapas Cipinang.⁶² Dia juga menjadi pemimpin dari sebuah kelompok yang terdiri dari puluhan napi garis keras di dalam Lapas Sukamiskin yang pada pertengahan tahun 2007 tampaknya jumlah anggotanya terus bertambah. Yang termasuk dalam kelompok ini yaitu Iqbaluzzaman, pelaku bom malam Natal tahun 2000; Yuli Harsono, bekas prajurit TNI; dan dua pelaku pembunuhan, Helmi dan Sugeng Said.⁶³ Semuanya menolak shalat di mesjid lapas kecuali untuk shalat Jum'at, karena mereka meyakini mesjid ini termasuk milik pemerintah, maka berarti haram untuk memakainya.⁶⁴

Walaupun begitu Oman dikenal punya banyak uang – mungkin dari hasil kerjanya menulis/menterjemahkan – dan beberapa pengikutnya tampaknya mendekati

diri kepadanya lebih karena untuk mendapatkan makanan dan fasilitas lain yang lebih baik daripada karena terbujuk oleh ideologi. Ketika pada bulan September 2007 Oman akhirnya dipindahkan dari Sukamiskin karena kegiatan perekrutannya, menurut laporan, beberapa pengikutnya mencukur habis jenggot mereka.⁶⁵ Namun dua pelaku pembunuhan Helmi dan Sugeng, menjadi jhadiis yang sangat serius.

Baru pada pertengahan tahun 2007 Oman diawasi dengan lebih dekat, dan para petugas lapas tidak terlalu senang dengan apa yang mereka temukan. Mereka sangat terkejut pada bulan Juli, ketika menemukan bahwa Oman dan Sugeng telah merekrut sembilan napi yang baru dipenjarakan selama dua bulan. Kesembilan orang ini adalah para calon pegawai negeri dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yang dihukum karena menganiaya sesama mahasiswa IPDN hingga tewas.⁶⁶ Mereka masuk ke Sukamiskin akhir bulan Mei. Gema Awal Ramadhan, salah seorang dari mereka, menurut laporan menjadi sangat militan sampai-sampai ia menolak menemui orangtuanya, mengkritik ibunya sebagai *thoghut* karena bekerja di kantor pemerintah.⁶⁷ Akibatnya, para pejabat lapas memutuskan untuk memindahkan para pelaku utama. Pada bulan September 2007, Oman dan Sugeng Said dipindahkan ke Lapas Cirebon; Gema Awal Ramadhan dipindahkan ke Lapas Subang dan Yuli Harsono ke Lapas Kuningan, kedua lapas ini berada di Jawa Barat. Dalam beberapa minggu Yuli kemudian dipindahkan lagi ke sebuah penjara di Bogor, lebih dekat ke Jakarta.

Masih perlu dilihat apakah Oman akan terus dapat melanjutkan kegiatan penerbitannya dari Cirebon dan apakah dia masih bisa memimpin kelompok Jama'ah Tauhid wal Jihad dari penjara yang baru. Tetapi para petugas lapas Cirebon, setidaknya untuk saat ini, telah memilih strategi isolasi, dengan menempatkan Oman dan Sugeng di sel yang sama, terpisah dari napi lain. Ini mungkin pilihan yang lebih baik tetapi hanya kalau dikombinasi dengan pengawasan yang ketat terhadap orang-orang yang mengunjunginya dan penegakan peraturan penjara yang lebih streng terhadap handphone, semuanya terlalu mudah disiasati dengan sedikit uang.

⁶⁰ Wawancara Crisis Group, Sukamiskin, April 2007.

⁶¹ Ubeid, yang ditahan hingga pertengahan 2007, sendiri adalah seorang penulis yang sangat produktif dan penterjemah dari dalam penjara dengan nama samaran Abu Musa ath-Thayyar. Buku yang ia kerjakan bersama dengan Oman adalah sebuah teks dari tulisan seorang radikal Mesir yang dipenjarakan, Abdul Qadir bin Abdul Aziz. Diterbitkan bulan Januari 2007 dengan judul 'Melacak Jejak Thaghut' oleh Kafayah Cipta Media di Klaten, Jawa Tengah, salah satu rumah penerbitan yang dikelola oleh anggota JI. Pada bulan Februari 2007, terjemahan Oman dari buku yang dikarang oleh Abu Bashir dari London diterbitkan dengan judul 'Tiada Khilafah Tanpa Tauhid wal Jihad' oleh ar-Rahmah media, yang dikelola Mohamed Jibril. Jibril, anak dari pimpinan MMI Abu Jibril, adalah salah seorang anggota sel JI di Karachi yang dikenal dengan nama al-Ghuraba yang dibubarkan bulan September 2003.

⁶² Wawancara Crisis Group, Jakarta, Agustus 2007.

⁶³ Ini mungkin Helmi Priwardhani, yang dihukum tujuh tahun penjara tahun 2004 karena membunuh seorang pengusaha Tionghoa. Lihat "Helmi Tetap Tenang Lalu Meyalami Hakim", *Pikiran Rakyat*, 5 Februari 2004.

⁶⁴ Wawancara Crisis Group, petugas Lapas Sukamiskin, Bandung, April 2007.

⁶⁵ Wawancara Crisis Group, petugas lapas, Bandung, September 2007.

⁶⁶ Mereka adalah Hendi Setiyadi, Dekky Susandi, Octaviano Minang, Gema Awal Ramadhan, Yopi Maulana, Dana Rekha, Bangun Robinson, Dadang Hadisurya dan Yayang Sopiyan. Sebelumnya mereka ditahan di Lapas Sumedang, Jawa Barat, bulan April 2007 tapi kemudian dipindah ke Sukamiskin setelah dijatuhi hukuman satu setengah tahun pada bulan Mei.

⁶⁷ Wawancara Crisis Group, petugas Lapas Sukamiskin, September 2007.

Kontrol terhadap handphone merupakan persoalan yang tidak habis-habisnya bagi seluruh petugas lapas. Direktur Jendral Pemasyarakatan mengemukakan bahwa para napi diijinkan untuk menulis surat kepada keluarga mereka, tetapi jaman sekarang tidak ada yang menulis surat lagi; bentuk komunikasi yang standar saat ini yaitu mengirim sms, katanya, dan kelihatannya tidak adil menurutnya mengambil hak para napi untuk berkomunikasi dengan keluarganya dengan cara ini. Ia mengatakan bersama dengan koleganya sedang memikirkan bagaimana caranya mengizinkan penggunaan handphone secara terbatas dan pada saat yang sama mencegah mereka menghubungi nomor-nomor yang tidak diijinkan.⁶⁸ Satu-satunya lapas dimana pihak yang berwenang telah memutuskan untuk memblokir signal handphone sama sekali yaitu di Nusakambangan. Dan menurut laporan pemblokirannya mencapai hingga radius 1 km dari kompleks lapas. Disitu pun, sejumlah para pelanggar narkoba tampaknya masih bisa mengakali – yaitu dengan menggunakan telepon satelit.⁶⁹

Hingga baru-baru ini, perhatian donor kepada penjara hanya terbatas pada persoalan HIV/AIDS diantara para napi. Pada tahun 2005, SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) mulai mendukung program dari Raoul Wallenberg Institut yang bertujuan mempromosikan HAM di dalam penjara. Konsorsium para donor, *Partnership for Governance Reform*, mendanai sebuah survey *baseline* bulan Juni 2007 mengenai topik diatas, yang berisi beberapa rekomendasi yang berguna mengenai pengembangan staff dan training bagi manajemen. Donor-donor lain mulai memperlihatkan ketertarikan dalam dalam program reformasi lembaga pemasyarakatan, tetapi kebutuhan atas program-program dengan sasaran tertentu berdasarkan penilaian kebutuhan yang terinformasi sudah sangat mendesak.

IV. STRATEGI-STRATEGI “DERADIKALISASI”

Situasi penjara yang korup, penuh kekerasan serta pengawasan para sipir yang buruk membuat upaya deradikalisasi perlu dikaji. Seperti telah dikemukakan diatas, “deradikalisasi” telah menjadi populer di lingkungan *counter-terror* tetapi tujuan akhir atau kriteria keberhasilannya masih belum diidentifikasi dengan jelas. Di kesempatan yang berbeda, tergantung siapa yang sedang bicara, proses konseling bisa ditujukan untuk mengubah penafsiran ayat-ayat penting yang telah diinterpretasikan dengan keliru; menjauhi atau membebaskan dari kelompok jhadi tertentu; atau membantu upaya rehabilitasi dan reintegrasi napi jhadi ke dalam masyarakat.

Strategi ini dapat meliputi program-program dakwah masyarakat untuk mencegah kelompok-kelompok yang rentan terhadap ideologi ekstrimis lewat “safari dakwah” oleh ustadz-ustadz kondang yang menentang kekerasan; penggunaan internet dan media lain secara inovatif untuk menangkal ajaran jhadis; dan program-program kegiatan untuk para pemuda yang kalau tidak diarahkan kemungkinan bisa menjadi target perekrutan.

Kalau dibawa selangkah lebih jauh, program-program deradikalisasi bisa dimaksudkan untuk memperkuat institusi-institusi “moderat” – sebuah pendekatan yang penuh lubang jebakan – atau dengan menanggapi ketidakpuasan sosial dan ekonomi di daerah-daerah dimana marjinalisasi dan diskriminasi telah mendorong ekstrimisme.⁷⁰ Namun, hampir semua program deradikalisasi dimulai dari penjara.

A. FOKUS PADA NARAPIDANA

Di Indonesia, satu-satunya upaya yang paling berarti dilakukan oleh polisi. Pada akhir tahun 2005 setelah bom Bali II, Wakil Presiden Yusuf Kalla memang telah mencoba untuk mengumpulkan para ulama dalam sebuah tim dibawah departemen agama untuk meng-*counter* ajaran jhadis, tetapi sejauh ini tidak membawa banyak perubahan, sebagian karena beberapa anggota tim tidak berhasil diyakinkan bahwa ada kebutuhan penting untuk melakukan hal ini, dan yang

⁶⁸ Wawancara Crisis Group dengan Dirjen Lembaga Pemasyarakatan Untung Sugiyono, Jakarta, 29 Oktober 2007.

⁶⁹ “Napi dan Sisir Sama-Sama Mengidap Stres”, *Indopos*, 5 September 2007; dan “Napi di Nusakambangan Pakai Telepon Satelit”, *Gatra*, 11 September 2007.

⁷⁰ Masalahnya terletak pada pendefinisian kata “moderat” dan mengasumsikan bahwa ada sebuah *zero-sum game* antara institusi “moderat” dan “radikal”, sehingga dengan memperkuat yang satu akan melemahkan yang lain. Selain itu institusi “moderat” yang dirangkul oleh donor Barat bisa memperlemah legitimasi mereka di dalam komunitas tersebut kalau hubungan itu dilihat sebagai bagian dari strategi counter-terror.

lain tidak tahu bagaimana isi ajaran yang seharusnya mereka tangkal.⁷¹

Pada awal tahun 2006, beberapa anggota tim melakukan kunjungan *high-profile* ke pesantren-pesantren yang terkait dengan JI, termasuk yang didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir di Ngruki, Solo, yang menghasilkan banyak pimpinan JI dan sejumlah pelaku aksi bom. Anggota tim tersebut mengumumkan bahwa misi mereka adalah untuk memulihkan nama baik pesantren al-Mukmin dan menghentikan kecurigaan bahwa pesantren Ngruki itu adalah sarang teroris.⁷² Memang mereka telah mengeluarkan dua buah buku mengenai interpretasi yang benar mengenai jihad, tetapi kelihatannya tanpa banyak pemikiran mengenai target pembacanya, apalagi pengetahuan tentang jangkauan dan kecanggihan industri penerbitan jihadi. Tim tersebut kadang masih mengadakan pertemuan, tetapi bukan dengan pemain yang signifikan.

Program polisi jauh lebih realistis, diarahkan pada para napi dan keluarga mereka, dan berkembang bersamaan dengan meningkatnya pengetahuan polisi mengenai jaringan radikal. Awalnya tujuannya adalah mengidentifikasi napi yang bisa diyakinkan untuk bekerja sama dan memberikan informasi mengenai JI dan kelompok lain. Dua bintangnya yaitu Nasir Abas dan Ali Imron. Nasir Abas, seorang warga negara Malaysia, sebelumnya adalah salah seorang pemimpin senior JI yang pernah berlatih di Afghanistan dan mendirikan struktur JI di Filipina Selatan. Ia percaya pada penggunaan kekuatan militer untuk membela agama dan sesama Muslim melawan penindasan, tetapi ia menentang penyerangan terhadap warga sipil dan belum pernah ikut dalam satupun operasi pengeboman di Indonesia.

Secara kontras Ali Imron, juga seorang veteran Afghanistan, ikut terlibat dalam operasi pengeboman rumah dubes Filipina dan bom malam Natal tahun 2000, dan bom Bali I. Dalam buku otobiografinya yang akan segera diterbitkan, dikemukakan bahwa walaupun ia agak keberatan dengan aksi-aksi penyerangan ini, ia tetap ikut karena percaya dengan orang-orang yang mengorganisirnya – termasuk kakak-kakaknya, Mukhlas dan Amrozi. Sementara wibawa Nasir Abas terletak pada pengalaman militer dan ketrampilan strateginya,

Ali Imron memiliki kredibilitas agama yang tidak bisa diragukan dan mampu beradu argumentasi mengenai poin-poin dalam hukum Islam dengan ustadz-ustadz terbaik JI.

Polisi mengambil resiko besar, memberi kedua orang ini akses ke tahanan lain sehingga mereka dapat berdiskusi secara informal tentang apa yang salah dan benar mengenai pendekatan mereka terhadap jihad. Nasir Abas memegang peran yang lebih besar sedari awal, sebagian karena ia belum pernah terlibat dalam kekerasan, telah menjalani hukuman sepuluh bulannya dengan cepat dan dapat bepergian ke daerah lain di Indonesia tanpa membuat kehebohan. Di lain pihak, Ali Imron harus menjalani hukuman seumur hidup atas keterlibatannya dalam bom Bali. Ketika pada bulan September 2004 dua orang wartawan lokal melihat Ali Imron sedang di warung kopi Starbucks di sebuah shopping mall elite di Jakarta bersama dengan seorang perwira polisi senior, protes dari Jakarta dan Canberra begitu hebat sehingga setelah itu ia menghilang dari pandangan umum, dan bekerja secara *low profile* dari dalam markas Polda Jakarta untuk melibatkan tahanan lain dalam diskusi.⁷³

Dari awal Polri sudah memahami bahwa debat apapun mengenai apa yang salah dan benar dari taktik yang mereka lakukan harus terjadi di dalam gerakan itu sendiri. Para jihadis tidak akan mendengarkan para “moderat” yang berada di luar kalangan mereka. Mereka juga paham bahwa tidak ada harapan para tahanan melakukan kontemplasi di dalam penjara biasa, karena setiap hari adalah perjuangan untuk mendapatkan uang, pengaruh atau proteksi. Karena itu tersangka yang paling penting bagi polisi, sudah hampir pasti selalu ditempatkan di dalam fasilitas tahanan milik Polda Jakarta dimana kondisinya jauh lebih baik, bukan di lapas-lapas atau rutan resmi. Sehingga kapan pun polisi dapat memanfaatkan pengetahuan mereka, dan Ali Imron dan juga Nasir Abas, dibantu oleh beberapa yang lain, dapat melakukan pekerjaan mereka.

B. ARGUMENTASI ALI IMRON

Argumentasi Ali Imron terhadap teman-teman JI nya tentang mengapa aksi pengeboman adalah taktik yang salah, bukan argumentasi yang akan disukai oleh masyarakat Barat dan bukan argumentasi yang akan dibuat oleh Muslim pada umumnya di Indonesia –

⁷¹ Tim Penanggulangan Teror (TPT) timbul dari inisiatif Wakil Presiden Yusuf Kalla untuk mengumpulkan sejumlah ustadz dirumahnya setelah kejadian bom Bali II untuk menonton video berisi pernyataan dari para pelaku bom bunuh diri dan mendiskusikan apa jalan yang terbaik untuk mengatasi hal ini.

⁷² “Pondok Ngruki Tak Terkait Terorisme”, *Koran Tempo*, 21 Januari 2006.

⁷³ “Bali bomber spotted at Starbucks (pelaku bom Bali terpergok wartawan di Starbucks)”, BBC News 24, 2 September 2004.

oleh karena itu sudah hampir pasti lebih meyakinkan bagi kalangannya.

Ia tidak mengatakan bahwa interpretasi para pelaku bom tentang jihad adalah salah. Sebaliknya, ia mengatakan, argumentasi mereka benar.⁷⁴ Karena Indonesia bukan sebuah negara Islam dan sangat mencari muka terhadap Amerika, oleh karena itu menurutnya sah-sah saja untuk melakukan pengeboman di Indonesia, terutama ketika Muslim dibunuh di Ambon dan Poso, dan Amerika bekerja sama dengan Israel memerangi Palestina. Kegagalan pemerintah Indonesia, ditambahnya, juga telah membiarkan ajaran-ajaran sesat, sekularisme dan kemusyrikan berkembang, tingkah laku yang tidak bermoral semakin banyak, perpecahan diantara sesama Muslim timbul dan jurang antara yang kaya dan miskin semakin lebar. Ali mengatakan ia dan kakak-kakaknya berharap bahwa pengeboman akan menjadi permulaan dari perang antara Muslim dan kafir dimana Islam akan menang, dan kebenaran serta keadilan akan ditegakkan.⁷⁵

Tetapi, katanya, kita telah bertindak terburu-buru. Kita tidak berhenti dulu untuk berpikir apakah kita sudah punya cukup kekuatan yang diperlukan untuk melawan para kafir, dan berperang tanpa persiapan yang memadai hanya akan menyengsarakan masyarakat. Kita tidak berhenti dulu untuk mempertanyakan apakah kita sudah memperoleh dukungan dari masyarakat Muslim, dan ternyata belum. Kita belum punya basis aman untuk membangun sebuah operasi, dan oleh karena itu tidak ada jaminan bahwa tujuan jihad akan dapat dipenuhi atau bahwa masyarakat Muslim akan mendapat manfaat dari tindakan kita. Kita tidak tahu pasti, ditambahnya, status dari mereka yang kita target, dan kitapun tidak mencoba membujuk mereka dengan cara lain, contohnya lewat dakwah agama, sebelum kita menyerang mereka. Kita tidak memikirkan secara masak-masak kerugian dan keuntungannya, dan ternyata kita membawa lebih banyak kerusakan daripada kebaikan bagi masyarakat kita sendiri.⁷⁶

Argumentasi semacam ini, dikombinasi dengan faktor lain, membantu meyakinkan beberapa anggota kunci JI, termasuk Mohammed Rais, yang pernah memimpin kantor JI di Kandahar, Afghanistan dan memegang peranan kecil dalam bom Marriott, dan juga Mubarak, seorang veteran Afghan yang seperti Ali Imron pernah terlibat dalam bom malam Natal dan bom Bali I. Tetapi gaya hidup Ali yang agak nyaman di dalam penjara

baru-baru ini telah dikritik dalam artikel yang dimuat dalam media massa Indonesia, dan ia telah dikecam munafik oleh bekas kolega JI nya, jadi mungkin pengaruhnya mulai berkurang.⁷⁷ Hal ini memperlihatkan bahwa polisi memerlukan masukan orang-orang baru dari kalangan jihadis dengan kedudukan tinggi yang namun sudah insyaf, jika mereka menginginkan bagian ideologi dari program mereka sukses.

Salah satu tujuan polisi memberi akses kepada Ali Imron dan Nasir Abas ke para napi baru yaitu untuk dapat meyakinkan mereka secara individu, dengan keyakinan bahwa, mengingat struktur hirarkis JI, jika seorang pimpinan berubah pikiran, yang lain akan mengikuti. Tapi walaupun begitu, seorang polisi mengemukakan, juga penting untuk memahami bahwa ideologi bukan satu-satunya kekuatan pendorong bagi seluruh anggota, dan banyak faktor lain yang berperan. Di Poso, dimana ada ketidakpuasan sosial, ekonomi dan politik tertentu, polisi mendapatkan bahwa anggota-anggota JI setempat, banyak yang tadinya preman, dan tidak terlalu komit dengan jihadisme. Strategi counter-teror yang paling baik untuk hal ini harus lebih dari strategi penegakan hukum semata, dan mencakup program-program lapangan kerja dan peradilan.⁷⁸

C. MERUBAH SIKAP TERHADAP PARA PETUGAS

Dengan menempatkan napi jihadis di tahanan Polda juga memberi kesempatan bagi polisi untuk mengubah sikap para jihadis terhadap mereka. Jadi hal ini bukan hanya karena polisi ingin disukai atau dipercaya, atau menurut keyakinan mereka bahwa kebaikan akan menghasilkan kerjasama. Tetapi sebenarnya, prinsip pokok ideologi jihadi yaitu bahwa polisi adalah thoghut dan anti-Islam, terutama ketika beberapa perwira senior counter-teror beragama Kristen, dan bahwa mereka adalah boneka kekuatan Barat dalam perang melawan terorisme. Kalau prinsip itu bisa dipatahkan, prinsip yang lain mungkin jadi bisa dipertanyakan.⁷⁹ Meskipun para tersangka terorisme sering tidak dikecualikan untuk

⁷⁴ Draft awal buku otobiografi Ali Imron, yang ditulis tahun 2005-2006, dan rencananya akan diterbitkan akhir November 2007.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Abu Rusdan, seorang pimpinan JI mengatakan, “pengeboman yang dilakukan Ali Imron di Bali mengakibatkan banyak orang yang tidak bersalah, termasuk saya, ditangkap. Kenapa sekarang dia jadi pahlawan?”, Tempo (edisi bahas Inggris), 19 November 2007. Mengenai kritik terhadap perlakuan polisi kepada Ali Imron, lihat “Terpidana Bom Bali Tinggal di Apartemen”, *IndoPos*, 16 Oktober 2007; “Polisi Dinilai Berlebihan”, *IndoPos*, 17 Oktober 2007; dan “Alasan Polisi Sulit Dipahami”, *IndoPos*, 18 Oktober 2007.

⁷⁸ Komunikasi Crisis Group lewat email dengan Kombes Pol Tito Karnavian, 27 Oktober 2007.

⁷⁹ Wawancara Crisis Group, Nasir Abas, Jakarta, Oktober 2007.

mengalami perlakuan polisi yang agak keras yang biasanya dilakukan terhadap penjahat yang baru ditangkap, tapi biasanya ketika sampai di Jakarta mereka diperlakukan dengan sangat baik.

Bahkan sebelum deradikalisasi menjadi populer, polisi telah memberi pertimbangan khusus kepada beberapa napi jihadi, membiayai kunjungan keluarga mereka dari Sumatra, Sulawesi, Kalimantan dan bahkan Malaysia, menyediakan sebuah rumah di Jakarta untuk mereka tinggal, menyediakan makanan, kadang membiayai pernikahan napi di dalam penjara, membantu belajar jarak jauh, menyediakan pelayanan kesehatan VIP, dan kadang ikut campur dengan jaksa atau hakim untuk “menegosiasikan” hukuman yang lebih ringan.⁸⁰ Ketika seorang tahanan baru ditangkap, penyidik akan mencari tahu masalah ekonomi mereka (seringkali mengenai uang sekolah anak-anak) dan kemudian mencari dana untuk bisa membantu mereka dengan cara yang dapat membuat para napi berterima kasih pada mereka dan mendorong kerjasama. Seorang perwira senior polisi mengatakan bahwa jika harus memilih antara pendekatan agama dan sosial ekonomi dalam hal deradikalisasi, ia akan selalu memilih pendekatan yang kedua, karena biasanya berhasil. Tetapi ia juga menekankan bahwa pendekatan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan tiap napi dan membangun sebuah ikatan pribadi, yang memakan waktu.⁸¹

Namun ada satu masalah, yaitu bahwa kebaikan ini tidak merata. Keluarga dari orang-orang yang ditangkap di Poso setelah operasi polisi bulan Januari 2007 dibanjiri perhatian, dan perjalanan mereka untuk bertemu keluarga dibiayai dengan royal. Para pemimpin JI yang ditangkap bulan Maret dan Juni 2007 yang tertembak dalam operasi polisi segera diberi perawatan kesehatan dan didorong untuk menceritakan kisah mereka di tv.

Situasinya sangat berbeda bagi para napi jihadis dari Ambon, yang sebagian besar tidak dihiraukan. Ketika keenambelas napi yang dipindahkan tiba-tiba dari Ambon ke Jawa Timur bulan Maret 2007, keluarganya sama sekali tidak menerima bantuan dari polisi untuk berkunjung dan tidak diberitahu sebelumnya tentang

rencana pemindahan mereka, dimana hal ini melanggar peraturan departemen kehakiman. Salah seorang yang dipindahkan tersebut, bernama Suhaib Ramadi, seorang veteran afghan JI, tertembak ketika ia ditangkap tahun 2005. Dua tahun kemudian, peluru itu masih bersarang di kakinya, dan ia sama sekali tidak senang dengan polisi. Baru pada bulan Agustus 2007, setelah Nasir Abas dengan tidak sengaja melihat namanya dalam daftar napi dan mengenalnya sebagai salah seorang kawan lama dari Afghanistan, polisi berpikir untuk mendekatinya. Setelah itu peluru di kakinya akhirnya dikeluarkan.

Ada tiga alasan utama perbedaan pendekatan terhadap para napi Poso dan Ambon. Yang pertama, Poso sangat penting bagi operasi JI yang terus berlangsung di Indonesia, sementara Ambon sudah tidak lagi, setelah konflik disana mereda. Perdamaian yang kekal di Poso setidaknya tergantung pada kemauan anggota JI setempat untuk mengakhiri jihad mereka dan dengan memutus hubungan logistik dengan Jawa. Yang kedua, karena pada akhirnya polisi merespon dengan menggunakan kekuatan pada bulan Januari 2007 dalam menghadapi kekerasan yang sedang berlangsung di Poso, maka polisi sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa mereka tidak menjadi target balas dendam.⁸²

Yang terakhir, menanggapi pemenggalan kepala tiga siswi Poso bulan Oktober 2005, polisi counter-teror telah menempatkan seorang perwira senior di Poso, yang mengawasi jalannya investigasi, dan segera ia mengenal para aktor utama dengan lebih dalam dan memahami betapa rumitnya konflik yang terjadi di Poso. Dan saat itulah polisi menyadari bahwa kalau mereka tidak dialihkan dari jihad, maka akan lahir generasi jihadi yang kedua.⁸³

Tetapi pertanyaan mengenai keseimbangan tetap ada, tidak hanya mengenai perlakuan terhadap berbagai kelompok napi yang berbeda-beda, tetapi juga dalam hal menyeimbangkan antara keadilan bagi para korban dengan keinginan untuk mencegah timbulnya kembali kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan.

⁸⁰ Salah satu contohnya yaitu pernikahan Amril Ngide alias Aat, seorang napi Poso, dengan pacarnya di Polda Jakarta bulan Oktober 2007. Selain membayari biaya pernikahan, polisi juga membiayai perjalanan pulang pergi dari Poso ke Jakarta buat mertua Aat dan seorang kerabat. Untuk informasi lebih rinci mengenai contoh-contoh perlakuan polisi yang sangat dermawan terhadap para tahanan jihadi, lihat tulisan Budi Setyarso “Inmates with Cell Phones (napi ber-handphone)”, Tempo (edisi bahasa Inggris), 19 November 2007.

⁸¹ Wawancara Crisis Group, Jakarta, 29 Oktober 2007.

⁸² Lihat Laporan Crisis Group di Asia N°127, *Jihad di Indonesia: Poso di Ujung Tanduk*, 24 Januari 2007.

⁸³ Karena berbagai alasan, Ambon dianggap tidak sepenting Poso. Disini juga pernah terjadi kekerasan yang berkelanjutan setelah perjanjian damai Februari 2002, tapi JI bukan pemain utama (KOMPAK yang lebih signifikan). Kalau tersangka utama Poso mau bekerja sama, hal ini bisa membantu membongkar lebih banyak jaringan dan membawa ke buron paling dicari, seperti Noordin Mohammed Top. Ambon juga lebih independen, sementara kekerasan di Poso selalu berpotensi merembet ke daerah lain di Sulawesi. Poso juga bagian dari rute ke Mindanao, sementara Ambon tidak.

Keluarga dari mereka yang tewas dalam serangan bom di pasar Tentena bulan Mei 2005 dan serangan lain mungkin tidak akan menghargai kemurahan hati polisi terhadap para pelaku bom dan keluarga mereka.

D. MENGGUNAKAN JARINGAN AFGHAN

Polisi adalah pihak yang pertama kali mengakui bahwa perlakuan khusus terhadap para napi dan keluarga mereka tidak selalu menyelesaikan persoalan yang lebih besar dalam upaya menonaktifkan gerakan jihad secara lebih luas. Seperti halnya dengan para tahanan yang dipindahkan dari tahanan Polda seringkali kembali ke cara berpikir yang lama, begitu juga para napi yang dibebaskan kemungkinan besar akan tertarik kembali ke lingkungan lama mereka, terutama karena JI dan komunitas serupa bukan cuma organisasi teroris yang berfokus pada jihad, melainkan merupakan perkumpulan masyarakat yang saling bertemu, makan, bermain volley, menjemput anak-anak mereka dari sekolah dan melakukan usaha bersama-sama. Buat mereka keluar dari JI merupakan hal yang tidak terbayangkan sama seperti menolak kewarganegaraan Indonesia, dan tidak pernah ada rencana untuk membuat hal itu sebagai sebuah tujuan. Pemikirannya melainkan adalah, mengapa tidak mencoba mendapatkan dukungan dari banyak anggota JI dan mencoba mengalihkan kegiatan mereka dari dalam.

Sebab itu pada awal Juli 2007, Nasir Abas, bekerja sama dengan Satgas Bom Polri, mengundang 28 alumni Afghan untuk menghadiri pertemuan di sebuah villa di Puncak, daerah peristirahatan di selatan Jakarta. Generasi Afghan – seluruhnya ada sekitar 300 orang – terus memiliki gengsi dan pengaruh diantara para jihadis, walaupun pada banyak kasus kepemimpinan telah diserahkan kepada mereka yang dilatih di Mindanao atau mereka yang memiliki pengalaman perang di Ambon dan Poso. Para undangan kebanyakan, tapi tidak hanya, JI – beberapa adalah anggota Darul Islam yang pernah di Afghanistan ketika DI-JI pecah pada tahun 1993, dan memilih untuk tidak bergabung dengan Abdullah Sungkar, pendiri JI. Beberapa undangan baru saja bebas dari penjara; yang lain belum pernah ditangkap; sejumlah kecil, seperti Ali Imron, secara teknis masih menjalani hukuman. Mereka memiliki persamaan tidak saja pernah training di Afghan tetapi menolak kekerasan yang tidak diprovokasi, dan pertanyaannya adalah bagaimana memanfaatkan pengaruh mereka untuk bisa mengajak yang lain di dalam gerakan untuk mengambil sikap yang sama.

Berbagai gagasan diajukan, menurut salah seorang yang hadir, termasuk mencoba menggunakan pendekatan

secara perorangan kepada para guru di pesantren-pesantren JI, dimana sekarang jumlahnya sekitar 30 sekolah.⁸⁴ Tetapi pertemuan itu tak lebih sebagai pertemuan pendahuluan, dan satu-satunya konsensus yang nyata adalah untuk pertemuan yang akan datang mereka sebaiknya mengundang lebih banyak alumni Afghan.

Sekarang diskusi tampaknya mengarah ke program yang akan membantu napi yang telah bebas dengan kredit atau pinjaman usaha, dengan harapan bahwa fokus pada tujuan ekonomi mungkin dapat membantu mengalihkan mereka dari kegiatan ideologi dan bahwa dengan adanya modal juga bisa menarik mereka yang tidak berminat untuk ikut bergabung.⁸⁵ Sudah hampir pasti hal ini akan menarik bagi para napi yang sebentar lagi akan bebas, yang akan butuh pekerjaan; tetapi hal ini mungkin juga akan menarik mereka yang hanya mau mengambil pinjaman, tapi tidak bersedia untuk membuat komitmen secara ideologi.

Patut dikemukakan bahwa pada akhir tahun 60-an dan awal tahun 70-an, angkatan bersenjata Indonesia menawarkan simpati, rekonsiliasi dan bantuan usaha kepada para mantan pemimpin Darul Islam di Jawa Barat, dalam upaya menangkal radikalisme Islam. Kebanyakan bantuan yang ditawarkan diterima, dan di beberapa kasus hal ini membawa kerjasama jangka panjang. Tetapi upaya kooptasi pemerintah juga memberi kemudahan bagi DI membangun organisasinya kembali – yaitu organisasi yang pecah menjadi JI tahun 1993. Kondisi politik di Indonesia sekarang ini sangat berbeda, tetapi pola yang telah terjadi di masa lalu sebaiknya patut menjadi peringatan bagi mereka yang membagi-bagikan pemberian hari ini.⁸⁶

⁸⁴ Mereka adalah pesantren-pesantren, kebanyakan dipimpin oleh anggota JI, yang memakai kurikulum dan manhaj (metode) yang sama dan memiliki sebuah program pendidikan guru, KMI, yang dirancang untuk menghasilkan kader-kader bagi organisasi JI.

⁸⁵ Kalau program ini jadi, menurut laporan tidak akan didukung oleh dana resmi dari polisi tapi sumbangan dari donatur-donatur pribadi.

⁸⁶ Quinton Temby, “Imagining an Islamic State in Indonesia”, B.A. honours thesis, Australian National University, 2007. Temby mengemukakan bahwa Kodam Siliwangi dan Opsus (singkatan dari Operasi Khusus, yaitu sebuah operasi rahasia sebuah lembaga intel), bekerja sendiri-sendiri sehingga memungkinkan DI mengadudomba mereka. Opsus juga berusaha untuk mengkooptasi DI ke dalam mesin politik Golkar. Perbedaan yang paling besar dengan tahun 2007 yaitu bahwa polisi tidak punya motif politik, mereka hanya ingin menghentikan serangan teroris.

E. MEREKA YANG TIDAK HADIR

Dua pertanyaan menarik mengenai pertemuan bulan Juli 2007 adalah siapa yang menolak undangan dan siapa yang tidak diundang. Yang paling menonjol untuk kategori pertama adalah Thoriqudin alias Abu Rusdan, seorang pemimpin senior JI yang menggantikan Abu Bakar Ba'asyir sebagai amir untuk sementara. Ia dibebaskan tahun 2005 setelah dipenjara selama dua setengah tahun, dan yang paling penting, saat ini sedang berupaya untuk membangun JI kembali. Ia memiliki pengaruh dan kredibilitas yang besar sekali, dan walaupun lebih mendekati ideologi kelompok Nasir Abas-Ali Imron – ia melihat bom Bali I dan serangan-serangan berikutnya yang dipimpin Noordin adalah kontraproduktif bagi JI – ia tampaknya menganggap kerjasama yang terang-terangan dengan polisi sebagai hal yang tidak dapat diterima. Selama ia mengambil sikap seperti itu, yang lain akan mengikuti.

Penolakannya memperlihatkan bahwa mereka yang ikut dalam pertemuan itu mungkin terdiri dari orang-orang dari golongan “kelas B” diantara para alumni Afghan, lapisan kedua yang memiliki pengaruh lebih kecil daripada mereka yang menolak datang. Hal ini tentunya tidak mengurangi pentingnya upaya untuk menggunakan para veteran Afghan sebagai ujung tombak, tetapi ia memperlihatkan bahwa jika Abu Rusdan juga mengkhotbahkan pesan yang sama, versi “mereka yang murni” dibandingkan dengan “mereka yang berkolaborasi” mungkin pada akhirnya akan lebih efektif diantara anak buah JI.

Diantara mereka yang tidak diundang adalah alumni Afghan yang berideologi *hardcore*, termasuk bekas pimpinan JI Jawa Timur, antara lain Fahim dan Son Hadi (keduanya sekarang sudah bebas dari penjara), dan yang lain yang memiliki pendapat sama. Mereka adalah orang-orang yang bekerjasama dengan, dan membantu, Noordin; dukungan mereka terhadap kekerasan adalah hal yang paling penting untuk diubah. Kalau tidak satupun dari mereka bergabung dengan Nasir Abas dan Ali Imron, maka kemungkinan para ujung tombak deradikalisasi sampai batas tertentu hanya berkhotbah pada mereka yang sebelumnya sudah berubah. Tetapi salah seorang yang terlibat dalam kelompok Afghan mengatakan bahwa ia melihat tujuannya tidak terlalu menitikberatkan pada mengubah cara berpikir Fahim dan rekan-rekannya, melainkan memastikan bahwa pengaruh mereka sedikit demi sedikit semakin berkurang.

Kelompok lain yang tidak hadir adalah para pemimpin kelompok jihadi selain JI. Sejauh ini mereka tidak terlalu diperhatikan – tidak ada yang seperti Ali Imron atau Nasir Abas dari kelompok KOMPAK atau Ring

Banten, yang bekerja untuk mencoba mengubah organisasi-organisasi tersebut dari dalam, walaupun sejak para pimpinan tinggi kedua organisasi tersebut juga ditahan di tahanan Polda Jakarta sampai awal tahun 2007, mereka juga diekspos ke diskusi dan debat yang sama dengan rekan sejawat mereka, JI. Karena ancaman operasi-operasi jihad tidak hanya datang dari JI tapi juga dari kelompok-kelompok kecil atau sempalan, maka patut untuk menjamin bahwa elemen-elemen ini juga diikuti dalam program sambil memikirkan tentang bagaimana memanfaatkan kelompok Afghan terus berjalan.

Tantangannya sekarang adalah untuk mengupayakan program-program riil, mendekati pesantren-pesantren JI, mencoba program-program pemberdayaan ekonomi untuk melihat apakah lapangan kerja setelah bebas dari penjara membawa pengaruh terhadap ideologi, dan menggunakan para alumni Afghan secara lebih sistematis di dalam penjara untuk memimpin diskusi-diskusi agama dengan berkunjung ke lapas. Masih terlalu awal untuk menilai kemajuan yang dicapai, tetapi paling sedikit kita sebaiknya memikirkan tentang apa yang bisa menjadi indikator kemajuan.

V. KESIMPULAN

Bahkan meskipun polisi sedang mengarahkan program deradikalisasi mereka kepada para napi dan mantan napi, mereka lah yang pertama kali mengakui bahwa kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini melemahkan upaya mereka. Hal yang sangat menunjukkan mengenai kualitas sistem lembaga pemasyarakatan di Indonesia yaitu bahwa polisi berupaya sekuat tenaga untuk tetap menahan para napi teroris penting di tahanan Polda, diluar sistem lapas yang normal karena di situ kemungkinan para napi ini kembali ke jalan mereka yang lama sangat tinggi.

Pilihan mengenai isolasi atau integrasi adalah penting tetapi mereka tidak dapat dibuat diluar program reformasi lapas yang lebih luas, terutama program pemberantasan korupsi dalam penjara, yang menjadi agenda penting dirjen lapas yang baru. Yang lebih penting dari memilih diantara dua kebijakan itu yaitu memberi pelatihan kepada para petugas lapas untuk melihat para napi teroris secara individu, dan menyesuaikan program-program lapas sesuai kebutuhan mereka masing-masing.

Program-program deradikalisasi penting, tapi tidak bisa dihindarkan bahwa sifatnya adalah *trial-and-error*. Dan karena para jihadis ini telah bergabung dengan gerakan radikal dengan alasan yang berbeda-beda, maka dari itu tidak cuma ada satu solusi untuk mencoba meyakinkan mereka menolak kekerasan. Didalam JI sendiri ada bermacam-macam orang, ada para pemrakarsa, para preman, para pemimpi, pengikut dan yang tidak sengaja menjadi kaki tangan, anggota lokal dari Poso termotivasi oleh faktor yang sangat berbeda dibanding mereka yang lulus dari pesantren-pesantren JI di Jawa Tengah.

Perlu pemikiran lebih lanjut mengenai bagaimana menilai “keberhasilan” program deradikalisasi, karena ada kemungkinan bahwa banyak dari mereka yang dianggap sudah di-deradikalisasi sebenarnya adalah mereka yang tidak pernah menjadi masalah, atau alasan seseorang menolak kekerasan bukan karena program polisi. Bahkan kalau kita bisa mengukur jumlah orang yang berhasil di-deradikalisasi berdasarkan kriteria tertentu, jumlah itu mungkin baru akan berarti kalau kita punya perkiraan jumlah anggota baru dan mengetahui bahwa balance-nya positif (yang keluar dari gerakan radikal lebih banyak dari yang masuk).

Penting juga untuk memberi perhatian pada para kriminal yang menjadi jihadis di dalam penjara. Di penjara-penjara dimana para napi “ustadz” ditahan, kemungkinan ada sekelompok kecil orang-orang semacam itu tetapi tidak jelas apakah ada yang mengawasi mereka atau menerapkan upaya deradikalisasi terhadap mereka. Kalau menyusun program untuk menjamin anggota JI yang baru bebas dari penjara punya kesempatan kerja menjadi hal yang penting, bagaimana dengan orang-orang yang baru direkrut di dalam penjara, seperti Beni Irawan, sipir Lapas Kerobokan, yang mungkin lebih militan dari guru mereka? Orang-orang ini juga perlu menjadi fokus program khusus, tapi sejauh ini tidak diperhatikan.

Sulit untuk menetapkan tujuan performa kerja bagi deradikalisasi karena bagi orang yang berbeda ia memiliki arti yang berbeda-beda. Tetapi menetapkan tujuan semacam ini untuk memperbaiki manajemen penjara adalah mungkin, diharapkan dan sangat perlu.

Jakarta/Brussels, 19 November 2007

APPENDIX A

PETA LAPAS DI INDONESIA YANG TERSEBUT DALAM LAPORAN INI



This map is adapted by the International Crisis Group from Map No. 4110 Rev. 4 (January 2004) by the Cartographic Section of the United Nations Department of Peacekeeping Operations. The towns Ampana, Bogor, Cirebon, Makassar and Porong have been added, and a number of small features removed. The location of all additional features is approximate.

APPENDIX B

NARAPIDANA INDONESIA YANG TERKAIT JI, SAMPAI DENGAN NOVEMBER 2007

DI	Darul Islam
FPI	Front Pembela Islam, Islamic Defenders Front
JI	Jemaah Islamiyah
RB	Ring Banten, a West-Java based splinter of Darul Islam
TWJ	Jemaah Tauhid wal Jihad, a Bandung-based group
LasJ	Laskar Jundullah, a Makassar-based group
TR	Tanah Runtuh, a JI-affiliated group in Poso but not all members were JI
KOMPAK	loose association of veterans of Ambon and Poso funded by the charity KOMPAK (Crisis Action Committee)
Kayamanya	a Poso group affiliated with KOMPAK

NAME	CRIME	SENTENCE	ORG
CIPINANG PRISON, JAKARTA			
1. Abdul Jabar	JI bombings 2000-2001	20 yrs	JI
2. Abdullah Sunata	Withholding info on Noordin	7 yrs	KOMPAK
3. Achmad Hasan	Australian embassy bombing	death	JI/Noordin
4. Agus Achmad	Australian embassy bombing	4 yrs	RB/DI
5. Ahmad Rofiq Ridho als Ali Zein	Assisting Noordin Top	7 yrs	JI/Noordin
6. Edy Setiyono alias Usman	JI bombings 2000-2001	life ⁸⁷	JI
7. Enceng Kurnia als Arham	Australian embassy bombing	6 yrs	DI
8. Fathurrahman	Assisting Noordin	3.5 yrs	FPI
9. Heri Sigu Samboja	Australian embassy bombing	7 yrs	JI/Noordin
10. Imam Buchori	Assisting Noordin	3.5 yrs	FPI
11. Iqbal Huseini als Reza	Australian embassy bombing	4 yrs	KOMPAK
12. Ismail als. Muh. Ikhwan	Marriott bombing	12 yrs	JI
13. Iwan Dharmawan als Rois	Australian embassy bombing	death	RB/DI
14. Joko Sumanto ⁸⁸	Withholding info on Noordin	4 yrs	JI/KOMPAK
15. Joko Tri Harmanto als Jek	Assisting Noordin	6 yrs	JI/KOMPAK
16. Joni Ahmad Fauzan	Assisting Noordin	4 yrs	JI
17. Masrizal als Tohir	Marriott bombing	10 yrs	JI
18. Solahudin als Miqdad als Chepi	False ID card	3 yrs	KOMPAK
19. Sunarto als Adung	Withholding info on Noordin	7 yrs	JI
20. Syaiful Bahri als Apuy	Australian embassy bombing	10 yrs	RB/DI
21. Taufik alias Dani	Atrium mall bombing 2001	20 yrs	JI
22. Umar Burhanuddin	Australian embassy bombing	3.5 yrs	JI
23. Moh.Nuh	A&W bombing 2006	4.5 yrs	none

⁸⁷ Currently negotiating for reduction to twenty years, in which case remissions process can go into effect.

⁸⁸ May have been released in October 2007.

SALEMBA DETENTION CENTRE, JAKARTA

24.	Salahuddin al-Ayubi	Assisting Noordin Top	7 yrs	JI
25.	Andi Makassar	Attempted murder, Poso	6 yrs	TR

NUSAKAMBANGAN PRISON COMPLEX

26.	Abdul Aziz alis Imam Samudra	Bali I	death	JI
27.	Aly Ghufron alias Mukhlas	Bali I	death	JI
28.	Amrozi	Bali I	death	JI

KALISOSOK PRISON, PORONG, EAST JAVA

29.	Abdullah Umamity	Loki attack, Maluku 2005	life	DI
30.	Agung Hamid	Makassar bombing	life	LasJ
31.	Asep Djaja alias Dahlan	Loki attack, Maluku 2005	life	KOMPAK
32.	Erwin Wakano	Villa Karaoke, Maluku 2005	6 yrs	local
33.	Hardi Tuasikal	Lateri attack, Maluku 2005	12 yrs	local
34.	Hasanuddin Muchtar als Harun	Post-Loki role 2005	9 yrs	DI
35.	Ismael Yamsehu	Villa Karaoke, Maluku 2005	life	local
36.	Muthalib Patty	Villa Karaoke, Maluku 2005	15 yrs	local
37.	Nachrum Wailisahalong als Teddy Gozali	Villa Karaoke, Maluku 2005	15 yrs	local
38.	Ongen Pattimura	Loki attack, Maluku 2005	life	local
39.	Rahmadi alias Suheb	Wamkana, Maluku 2005	15 yrs	JI
40.	Ridwan Lestaluhu	Villa Karaoke, Maluku 2005	12 yrs	local
41.	Rusli Amiludin	Villa Karaoke, Maluku 2005	7 yrs	local
42.	Cholid alias M. Soleh	Lateri attack, Maluku 2005	15 yrs	TWJ
43.	Syamsul Bahri Sangadji	Villa Karaoke, Maluku 2005	18 yrs	local
44.	Zainudin als Nurdin	Wamkana and Loki	20 yrs	DI

KEROBOKAN PRISON, BALI

45.	Abdul Aziz alias Jafar	Bali II	8 yrs	JI/Noordin
46.	Abdul Rauf	Bali I	16 yrs	RB/DI
47.	Achmad Roihan alias Saad	Minor post-Bali I role	9 yrs	JI
48.	Andi Hidayat	Bali I	15 yrs	RB/DI
49.	Andri Octavia	Bali I	16 yrs	RB/DI
50.	Anif Solchanudin	Bali II	15 yrs	Noordin
51.	Dwi Widiyanto alias Wiwid	Bali II	8 yrs	Noordin
52.	Junaedi	Bali I	15 yrs	RB/DI
53.	Moh. Cholily	Bali II	18 yrs	JI/Noordin
54.	Sarjiyo als Sawad	Bali I	life	JI
55.	Abdul Ghoni alias Umar Besar	Bali I	life	JI
56.	Abdul Kadir Maskur	Bali I	15 yrs	JI

KEDUNG PANE PRISON, SEMARANG

57.	Adithya Triyoga	Bali II	6 yrs	Noordin
58.	Agung Setiyadi	Imam Samudra laptop	6 yrs	Noordin
59.	Ardi Wibowo	Bali II	6 yrs	unclear
60.	Beni Irawan	Imam Samudra laptop	5 yrs	unclear
61.	Harry Setya Rahmadi	Bali II	5 yrs	Noordin
62.	Heri Suyatno als Heru Setiawan	Sri Rezeki depot 2003	10 yrs	JI
63.	Joko Ardianto als Luluk	Sri Rezeki depot 2003	10 yrs	JI
64.	Mahmudi Haryono alias Yusuf	Sri Rezeki depot 2003	10 yrs	JI
65.	Muh. Agung Prabowo	Imam Samudra laptop	3 yrs	Noordin
66.	Mustaghfirin	Assisting Noordin	12 yrs	JI/Noordin
67.	Siswanto	Sri Rezeki depot 2003	10 yrs	JI
68.	Sri Pujimulyono	Bali II	6 yrs	JI
69.	Subur Sugiarto	Bali II	life	JI/Noordin
70.	Wawan Suprihatin	Bali II	10 yrs	Noordin

WIROGUNAN PRISON, YOGYA

71.	Muh. Auwal Suhardi	Kauman mosque 2000	2 yrs	DI
72.	Taufiqurrahman als Akram	Kauman mosque 2000	3 yrs	DI
73.	Wahyudiarto als Saifullah	Kauman and Mamasa	5 yrs	DI

CIREBON PRISON

74.	Aman Abdurrahman	Cimanggis bomb class 2004	7 yrs	TWJ
-----	------------------	---------------------------	-------	-----

SUKAMISKIN PRISON, BANDUNG

75.	Iqbaluzzaman	Christmas Eve bombings	20 yrs	DI
-----	--------------	------------------------	--------	----

PALEDANG PRISON, BOGOR

76.	Yuli Harsono	Illegal ammo, mil.training	4 yrs	MMI/TWJ
-----	--------------	----------------------------	-------	---------

GUNUNG SARI PRISON, MAKASSAR

77.	Ahmad Rizal als Ical	Palopo bombing 2004	18 yrs	LasJ
78.	Anthon bin Labasse	Makassar bombings 2002	8 yrs	LasJ
79.	Antoni alias Armanto	Makassar bombings 2002	12 yrs	LasJ
80.	Arman bin Abdul Samad	Makassar bombings 2002	18 yrs	LasJ
81.	Haerul	Makassar bombings 2002	7 yrs	LasJ
82.	Herman alias Arman	Palopo bombing 2004	9 yrs	LasJ
83.	Heryanto alias Anto	Palopo bombing 2004	9 yrs	LasJ
84.	Ilham Riadi	Makassar bombings 2002	8 yrs	LasJ
85.	Imal Hamid	Makassar bombings 2002	6 yrs	LasJ

86.	Jasmin bin Kasau ⁸⁹	Palopo bombing 2004	20 yrs	LasJ
87.	Kamaruddin als Komar	Palopo bombing 2004	14 yrs	LasJ
88.	Lukman bin Husain alias Luke	Makassar bombings 2002	7 yrs	LasJ
89.	Masnur bin Abd Latif	Makassar bombings 2002	12 yrs	LasJ
90.	Muhammad Tang	Makassar bombings 2002	7 yrs	LasJ
91.	Mukhtar Dg Lau	Makassar bombings 2002	7 yrs	LasJ
92.	Muliadi alias Umar	Makassar bombings 2002	12 yrs	LasJ
93.	Salamun als Amun	Ambon violence	18 yrs	??
94.	Supriyadi	Makassar bombings 2002	7 yrs	LasJ
95.	Suryadi Masud	Makassar bombings 2002	8 yrs	LasJ
96.	Usman Nuraffan alias Salman	Makassar bombings 2002	12 yrs	LasJ
97.	Wira Hadi	Makassar bombings 2002	19 yrs	LasJ

MEDAENG DETENTION CENTRE, Surabaya

98.	Ahmad Arif ⁹⁰	Explosives possession	3 yrs	JI
-----	--------------------------	-----------------------	-------	----

PATOBO PRISON, PALU

99.	Andi Ipong	Murder of Balinese journalist, Poso	9 yrs	TR/JI
100.	Herwadi	22 Jan. 2007 shootout, Poso	4 yrs	??
101.	Iswadi Larata	22 Jan. 2007 shootout, Poso	3 yrs	??
102.	Jufri alias Breng	22 Jan. 2007 shootout, Poso	1 yr	??
103.	Moh. Fadli Barasalim als Opo ⁹¹	Armed robbery	5 th	KOMPAK
104.	Muhrin	22 Jan. 2007 shootout, Poso	3 yrs	none
105.	Rasiman alias Man	22 Jan. 2007 shootout, Poso	3 yrs	none
106.	Sukirno	22 Jan. 2007 shootout, Poso	4 yrs	TR
107.	Sutomo als Ustadz Yasin	22 Jan. 2007 shootout, Poso	5 yrs	TR/JI
108.	Yusuf Asapa	Murder of Balinese journalist, Poso	9 yrs	TR/JI

RUTAN MAESE, PALU

109.	Anang alias Papa Enal ⁹²	Rev. Susianti murder, Poso	4 yrs	TR/JI
110.	Imron	22 Jan. 2007 shootout, Poso	3 yrs	??
111.	Ma'ruf	22 Jan. 2007 shootout, Poso	3 yrs	??
112.	Sarjono als Paiman	22 Jan. 2007 shootout, Poso	4 yrs	TR/JI
113.	Upik Pagar	22 Jan. 2007 shootout, Poso	4 yrs	TR/JI
114.	Yakub als Faisal	22 Jan. 2007 shootout, Poso	1 yr 4 mos	TR/JI

⁸⁹Escaped September 2007.

⁹⁰Reportedly will be transferred shortly to Lamongan Prison, East Java.

⁹¹Opo was not charged with terrorism but with the ordinary crime of robbery, although he has a long history of involvement in jihadi violence, and the robbery was committed as *fa'i*, to raise funds for jihad. The others in his group, who were also arrested and tried, were Rusli Tawil, Syakur, Farid Ma'ruf, Ipet, Iswadi Ma'ruf and Jusman Saehed.

⁹²While Papa Enal was put on the police wanted list for the murder of Protestant pastor Susianti Tinalele, he was only charged for his involvement in the 22 January 2007 shootout in Poso. Police say if he misbehaves after release, they can always resuscitate the murder charge.

AMPANA PRISON

115. Ibnu als Thoyib	11 Jan. 2007 raid, Poso	4 yrs	TR/JI
116. Mardiyanto alias Didi	22 Jan. 2007 shootout, Poso	4 yrs	TR
117. Rahmat Duslan als Mat	22 Jan. 2007 shootout, Poso	3 yrs	Kayamanya
118. Rizal alias Inong	Helmi murder, Poso	3 yrs	TR
119. Syukur alias Ukung	22 Jan. 2007 shootout, Poso	4 yrs	TR
120. Wahyudin als Yuyun	22 Jan. 2007 shootout, Poso	3 yrs	none
121. Wikra Wardana alias Aco	22 Jan. 2007 shootout, Poso	3 yrs	Kayamanya

TANJUNG GUSTA PRISON, MEDAN

122. Indrawarman als Toni Togar	Xmas Eve bombings/Lippo bank	12 yrs	JI
123. Purwadi	Lippo bank robbery	10 yrs	JI
124. Syahrudin Harahap als Aan	Lippo bank robbery	12 yrs	JI
125. Waluyo als Moh. Aryo	Lippo bank robbery	10 yrs	JI
126. Ramli als Tono	Lippo bank robbery	10 yrs	JI
127. Mustafa Harahap als Hendra	Lippo bank robbery	10 yrs	JI
128. Ramli alias Gogon	Lippo bank robbery	9 yrs	JI

BENGKULU PRISON

129. Sardona Siliwangi	Marriott bombing assistance	8 yrs	JI
------------------------	-----------------------------	-------	----

AMBON PRISON

130. Ancu Parry	Villa Karaoke attack		
131. La Ode Rusdy	Villa Karaoke attack		
132. Sarmin Makiang	Pasar Mardika		
133. Sultan Qolbi alias Arsyad	Ambon violence	15 yrs	KOMPAK
134. Said Laisow als Aco	Lateri grenade attack	5 yrs	local
135. Said Taha Assagaf	Villa Karaoke attack	local	
136. Kasim Wally ⁹³			
137. Syarif Tarabubun	Villa Karaoke attack	15 yrs	unclear

JAKARTA POLICE HEADQUARTERS

138. Agus Jenggot ⁹⁴	Schoolgirl beheading, Poso	–	TR/JI
139. Ali Imron	Bali I	life	JI
140. Amril Ngiode alias Aat	Tentena bombing, Poso	–	TR/JI
141. Ardin	Rev. Susianti murder, Poso	–	TR/JI
142. Basri	Various Poso attacks	–	TR/JI
143. Purnama Putra als Usman	Australian embassy bombing	7 yrs	KOMPAK

⁹³ Kasim Wally was a minor when he was arrested, probably aged sixteen, and a junior high school student. Police claimed he was twenty, however, despite entreaties from his parents.

⁹⁴ The trials of Agus Jenggot and the other Poso detainees were ongoing as this report went to press. Prosecutors requested sentences of twenty years for all in mid-November 2007.

144. Ridwan	Poso attacks		TR/JI
145. Tugiran	Armed robbery, Poso	–	TR/JI
146. Utomo als Mubarak	Bali I	life	JI
147. Wiwin Kalahe	Various Poso attacks	–	TR/JI
148. Yudit Parsan	Rev. Susianti murder, Poso		TR/JI
149. Mujadid als Brekele	Arrested March 2007	–	JI
150. Idris als Jhoni Hendrawan	Marriott bombing	10 yrs	JI

BRIMOB HEADQUARTERS, Kelapa Dua Jakarta

151. Ainul Bahri als Abu Dujana	Arrested June 2007	–	JI
152. Arief Saifuddin	Arrested June 2007	–	JI
153. Aris Widodo	Arrested June 2007	–	JI
154. Aziz Mustofa	Arrested June 2007	–	JI
155. Nur Afifuddin als Suharto	Arrested June 2007	–	JI
156. Taufik Kondang alias Ruri	Arrested June 2007	–	JI
157. Zarkasi alias Nuaim alias Mbah	Arrested June 2007	–	JI
158. Ahmad Syahrul Uman	Arrested March 2007	–	JI
159. Amir Achmadi	Arrested March 2007	–	JI
160. Mahfudz Qomari Sutarjo als Ayyasi	Arrested March 2007	–	JI
161. Maulana Yusuf Wibisono als Kholis	Arrested March 2007	–	JI
162. Sarwo Edi Nugroho	Arrested March 2007	–	JI
163. Sikas als Abi Salim	Arrested March 2007	–	JI

NATIONAL POLICE HEADQUARTERS

164. Abdul Muis	Kongkoli murder, Poso	–	JI
165. Irwanto Irwano	Schoolgirl beheading, Poso	14 yrs	JI
166. Lilik Purwanto alias Haris	Schoolgirl beheading, Poso	14 yrs	JI

WEST JAKARTA SUBDISTRICT POLICE COMMAND

167. Hasanuddin	Schoolgirl beheading, Poso	20 yrs	JI
-----------------	----------------------------	--------	----

APPENDIX C

NARAPIDANA JI YANG BARU SAJA DIBEBASKAN

Note: this list is almost certainly incomplete, even for the two years covered, because releases are rarely reported. Of the 62 listed here, half are JI. As *alumni bui* (ex-prisoners), they generally do not return to formal positions within the JI structure even if they retain significant influence. As a result many areas now have two sets of leaders, the experienced ex-prisoners and the often less experienced formal office-holders untainted by arrest.

DI	Darul Islam
FPI	Front Pembela Islam, Islamic Defenders Front
JI	Jemaah Islamiyah
RB	Ring Banten, a West-Java based splinter of Darul Islam
TWJ	Jemaah Tauhid wal Jihad, a Bandung-based group
LasJ	Laskar Jundullah, a Makassar-based group
TR	Tanah Runtuh, a JI-affiliated group in Poso but not all members were JI
KOMPAK	loose association of veterans of Ambon and Poso funded by the charity KOMPAK (Crisis Action Committee)
Kayamanya	a Poso group affiliated with KOMPAK

NAME	CRIME	SENTENCE	ORG
RELEASED IN 2007 AFTER COMPLETING SENTENCE			
1. Ahmad Sofyan alias Tamim ⁹⁵	Illegal weapons	5 yrs	JI
2. Bagus Budi Pranoto als Urwah	Assisting Noordin	3.5 yrs	JI/Noordin
3. Bambang Setiono	Illegal weapons	7 yrs	JI
4. Bandang alias Haikal	Poso	??	TR
5. Dany Chandra alias Yusuf	Illegal explosives	4 yrs	KOMPAK
6. Fadli Sadama	Assistance to Noordin	??	JI
7. Fajri alias Yusuf	Hiding Achmad Roihan, Palu	6 yrs	JI
8. Fauzan Arif	Illegal weapons, Lampung	5 yrs	JI
9. Firmansyah ⁹⁶	Hiding Achmad Roihan, Palu	5 yrs	JI
10. Herlambang	Hiding Bali I bombers	6 yrs	JI
11. Irun Hidayat	Minor Aus Embassy role	3 yrs	RB/DI
12. Lutfi Hudaeroh alias Ubeid	Withholding info	3.5 yrs	JI/Noordin
13. Makmuri	Assistance to Bali I bombers	7 yrs	JI
14. Moh. Rais ⁹⁷	Marriott	7 yrs	JI
15. Moh. Yunus	Hiding Ali Imron, Kaltim	7 yrs	KOMPAK
16. Mohmad Najib Nawawi	Hiding Bali bombers	7 yrs	JI
17. Mustofa alias Abu Tholut ⁹⁸	Illegal ammo and explosives	7 yrs	JI
18. Nizam Khaleb	Hiding Achmad Roihan, Palu	6 yrs	JI
19. Sudigdoyo	Helping Noordin and Azhari 2003	5 yrs	JI
20. Adrian Ali alias Holis	Christmas Eve bombings	5 yrs	JI
RELEASED IN 2006 AFTER COMPLETING SENTENCE			
21. Abdul Haer	Beteleme attacks, Poso	4 yrs	Kayamanya
22. Abu Bakar Ba'asyir	JI activities	30 mos	JI
23. Adi Suryana alias Qital ⁹⁹	JI special forces training	4 yrs	JI

⁹⁵ Former head of military affairs for *wakalah* (subdivision) Jakarta, JI.

⁹⁶ Former head of *wakalah* Palu, JI.

⁹⁷ Was head of JI office, Kandahar, Afghanistan 2000.

⁹⁸ First head of Mantiqi III, central command member, head of special forces.

⁹⁹ Former head of training for Mantiqi II, former member of central command (*markaziyah*).

24.	Ali Maksum als Mad Haji Sun	Poso	??	unclear
25.	Amran bin Mansur	Xmas eve, Marriott (minor roles)	??	JI
26.	Andang alias Ridwan	Beteleme attacks, Poso	??	Kayamanya
27.	Arman alias Iwan	Beteleme attacks, Poso	??	Kayamanya
28.	Azhari Dipo Kusumo	Hiding Ali Imron	6 yrs	JI
29.	Chatib bin Kadri	Hiding Ali Imron	??	unclear
30.	Dadang Surachman	Illegal ammunition	??	DI
31.	Datuk Rajo Ameh	Xmas eve bombings, Riau	3 yrs	JI
32.	Edi Sugiarto	Xmas eve bombings, Medan	11 yrs	unclear
33.	Edi Suprpto Tsalabah ¹⁰⁰	Withholding info on training	3 yrs	JI
34.	Eko Hadi Prasetyo	Hiding Ali Imron, Kaltim	4 yrs	unclear
35.	Farid Podungge ¹⁰¹	Illegal weapons	20 mos	Kayamanya
36.	Gun Gun Rusman Gunawan ¹⁰²	Withholding info, funding Marriott	4 yrs	JI
37.	Hamdan alias Komar	Beteleme attacks, Poso	4 yrs	Kayamanya
38.	Hamzah Baya ¹⁰³	Hiding Ali Imron, Kaltim	6 yrs	unclear
39.	Hasyim alias Acim	Beteleme attacks, Poso	3.5 yrs	Kayamanya
40.	Hence Said Malewa ¹⁰⁴	Illegal weapons	20 mos	Kayamanya
41.	Hendra Yadi	Beteleme attacks, Poso	??	Kayamanya
42.	Heri Hafidin ¹⁰⁵	Hiding Imam Samudra, Bali I	7 yrs	DI/RB
43.	Imam Susanto ¹⁰⁶	Hiding Ali Imron, Kaltim	4 yrs	unclear
44.	Karsidi	Illegal ammo	??	DI
45.	Muhajir bin Aman	Hiding Ali Imron, Kaltim	4 yrs	unclear
46.	Muhamad Rusi alias Mujarot	Hiding Ali Imron, Kaltim	5 yrs	unclear
47.	Munfiatun al-Fitri ¹⁰⁷	Withholding info on Noordin	3 yrs	JI
48.	Munir Ansori	Palopo bombing 2004	2.5 yrs	LasJ
49.	Nyole	Attacks in Mamasa, Sulawesi	??	TR/JI
50.	Puryanto	Hiding Ali Imron, Kaltim	4 yrs, 8 mos	unclear
51.	Samuri Farich Mushofa	JI special forces training	3 yrs	JI
52.	Sirojul Munir	Hiding Ali Imron, Kaltim	5 yrs	unclear
53.	Solihin als Rofi	JI special forces training	3.5 yrs	JI
54.	Sofian Djumpai als Pian	Weapons possession, Poso	2 yrs	Kayamanya
55.	Sofyan Hadi ¹⁰⁸	Hiding Ali Imron, Kaltim	6 yrs	unclear
56.	Son Hadi bin Muhajir ¹⁰⁹	Withholding info on Noordin	4 yrs	JI
57.	Sukastopo	Helping Ali Imron, Kaltim	3 yrs	unclear
58.	Surono	Illegal weapons; acquitted of Marriott	3 yrs	JI
59.	Syafri alias Aco GM	Beteleme attacks, Poso	4 yrs	Kayamanya
60.	Syamsul Bahri bin Hussein	JI special forces training	3 yrs	JI
61.	Usman bin Sef alias Fahim ¹¹⁰	Hiding Noordin and Azhari	3 yrs	JI
62.	Utomo alias Abu Faruq ¹¹¹	JI special forces training	??	JI

¹⁰⁰ Former treasurer, *wakalah* Lampung, JI.

¹⁰¹ Released but re-arrested in 2007 for bombing attempt in Poso in June 2007.

¹⁰² Younger brother of Hambali, detained by U.S. in Guantanamo.

¹⁰³ Former student of Ali Imron's in Lamongan, East Java.

¹⁰⁴ Acquitted of murder of prosecutor Fery Silalahi, a JI crime initially attributed to Hence's group.

¹⁰⁵ Senior figure in Darul Islam/Ring Banten, whose followers robbed a gold store to raise funds for Bali I.

¹⁰⁶ Former student of Ali Imron's, Lamongan, East Java.

¹⁰⁷ Married Noordin in secret ceremony June 2004.

¹⁰⁸ Former student of Ali Imron's in Lamongan, East Java.

¹⁰⁹ Briefly head of *wakalah* East Java, JI.

¹¹⁰ Head of *wakalah* East Java 1999-2003.

¹¹¹ Former head of *wakalah* Lampung.